

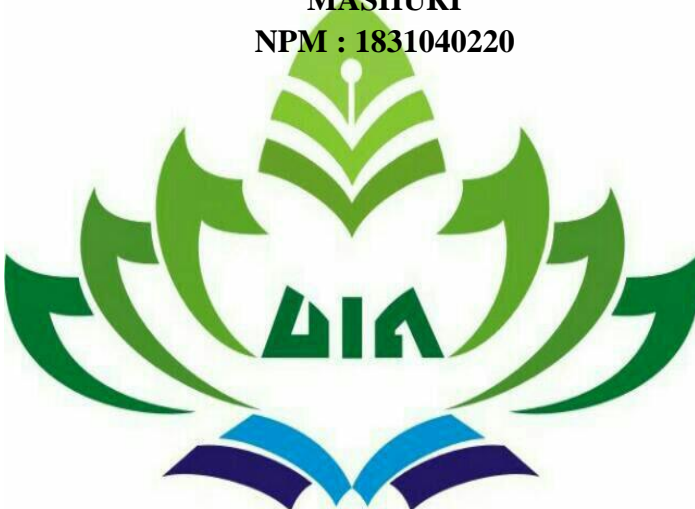
**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA DI KECAMATAN
NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh

MASHURI
NPM : 1831040220



Program Studi: Pemikiran Politik Islam

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445H / 2024 M**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM
PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA DI KECAMATAN
NGARAS KABUPATEN PESISIR BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)
Dalam Ilmu Ushuluddin Dan Studi Agama

Oleh

MASHURI

NPM : 1831040220



Program Studi: Pemikiran Politik Islam

Pembimbing 1 : Abd. Qohar, M. Si

Pembimbing 2 : Gesit Yudha, M.I.P

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTANLAMPUNG
1445H / 2024 M**

ABSTRAK

Oleh
MASHURI

Wabah pandemi Covid-19 (*coronavirus Disease 2019*) yang mengguncang Indonesia ditahun 2020 ini berdampak sangat buruk di semua aspek, salah satunya adalah banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaannya. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang mengalami kerugian menjadi penyebabnya, sehingga mengharuskan mereka mem-PHK karyawannya karena mengalami kepailitan. Karena adanya masalah tersebut, pemerintah menghadirkan program kartu prakerja sebagai salah satu solusi dari masalah yang sedang terjadi.

Penelitian ini juga bertujuan agar mengetahui proses dan tindak lanjut implementasi kebijakan Kartu Prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan metode *Snowball sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan teori Edward III; program kartu prakerja sudah mengkomunikasikan mengenai persyaratan melalui berbagai lini masa. Namun, karena masih terdapat beberapa miskomunikasi bagi pendaftar yang lolos dengan tidak sesuai persyaratan dan kurang meluasnya sosialisasi secara merata kepada masyarakat. Adapun sumberdaya, masyarakat yang mengikuti program prakerja ini senang karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Pada disposisi, terdapat kepuasan bagi peserta yang sudah lolos program prakerja dan sudah mengikuti pelatihannya. Dan struktur birokrasi, SOP dalam Peraturan program prakerjan ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat persyaratan dan aturan bagi pendaftar prakerja.

Kata Kunci : *Implementasi, Program Kartu Prakerja, Kompetensi Kerja*

ABSTRACT

The Covid-19 (coronavirus Disease 2019) pandemic that rocked Indonesia in 2020 had a very bad impact on all aspects, one of which is the large number of people who have lost their jobs. The number of companies that experience losses is the cause, so it requires them to lay off their employees because they are in bankruptcy. Because of this problem, the government presents the Prakerja card program as one of the solutions to the problems that are currently happening.

This research also aims to know the process and follow-up to the implementation of the Prakerja Card policy in improving work competence in Ngaras District, Pesisir Barat Regency. The method used in this study is qualitative research that is descriptive with the type of field research (field research) with the Snowball sampling method.

Based on the results of research using Edward III's theory; The pre-employment card program has communicated requirements through various timelines. However, there is still some miscommunication for applicants who pass due to non-compliance with the requirements and lack of widespread socialization to the community. As for resources, people who take part in this pre-employment program are happy because it provides many benefits to the community. In terms of disposition, there is satisfaction for participants who have passed the pre-employment program and have attended the training. And the bureaucratic structure, SOPs in the pre-employment program regulations are quite good from the SOP aspect which contains requirements and rules for pre-employment applicants.

Keywords: Implementation, Pre-Employment Card Program. Work Competency.

SURAT PERNYATAAN

Assalamua'laikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mashuri
NPM : 1831040220
Jurusan / Prodi : Pemikiran Politik Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “***Implementasi Progam Kartu Prakerja Dalam Peningkatan Kompetensi Kerja Di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat***“ adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi maupun saduran dan karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamua'laikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 15 Desember 2023



Mashuri

NPM. 1831040220



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmih Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Judul, Skripsi **Implementasi Program Kartu Prakerja Dalam
Peningkatan Kompetensi Kerja Di
Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat**

Nama Mahasiswa **Mashuri**
NPM **1831040220**
Jurusan **Pemikiran Politik Islam**
Fakultas **Ushuluddin dan Studi Agama**

MENYETUJUI

Untuk Dimunaqosahkan Dan Dipertahankan Dalam Sidang
Munaqosah Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama UIN Raden Intan
Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Abd. Oohar, M. Si
NIP. 197103122005011005

Gesit Yudha, M.I.P
NIP. 199008302023211010

Mengetahui

Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam

Abd. Oohar, M.S
NIP. 197103122005011005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN
INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suraimin Sukarame Bandar Lampung
Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Implementasi Program Kartu Prakerja
Dalam Peningkatan Kompetensi Kerja di Kecamatan Ngaras
Kabupaten Pesisir Barat" disusun oleh Mashuri, NPM. 1831040220
Program Studi Pemikiran Politik Islam, telah diujikan dalam sidang
Munaqosah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan
Lampung pada hari/tanggal : Selasa, 19 Desember 2023, jam 13.00
14.30 WIB

TIM PENGUJUI

Ketua Sidang : Dr. Suhandi, M. AG

Sekretaris Sidang : Dwi Rosmawati, S. TR. KEB., M. KES

Penguji Utama : Angga Natalia, M. I. P

Penguji Pendamping I : Abd. Qohar, M. S. I

Penguji Pendamping II : Gesit Yudha, M. I. P

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. Ahmad Isaeni, MA

NIP. : 19703302000031001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ
بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya

: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan.” Q. S. An-Nisa: 135



PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Esa dan atas takdir segala nikmatnya *Alhamdulillahirobbilamin* penuh rasa syukur yang tidak hentinya kau jadikan aku seorang insan yang senantiasa berusaha, berfikir, berilmu, bersyukur dan beriman kepadamu, serta sabar dalam menjalani takdir kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi salah satu langkah awalku dalam meraih cita-cita yang telah kutanamkan sejak kecil dan skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Terimakasih kepada Ibu ku tercinta Laila Suri dan bapak ku tercinta Alm. Hasanan, terimakasih atas segala cinta, kasih sayang, doa yang tidak ada hentinya, kesabaran, motivasi, mendidik, keikhlasan, perjuangan, pengorbanan, yang selalu diberikan hingga terselesaikannya skripsi penulis. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya, kesehatan, keberkahan, umur, kemurahan rezeki, serta selalu dalam perlindungan kebaikan Allah SWT. *Aamiin Ya Rabbal Alamin.*
2. Terimakasih kepada kakak perempuanku Nurhayati, kakak laki-lakiku kak Samsuri dan Kak Haryadi yang selalu memberi suport sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Terimakasih kepada Ayah asuh tercinta Oki Darmawan Djusar yang telah bersedia menyiapkan fasilitas rumah dengan gratis hingga selesai perkuliahan, banyak memberi motivasi kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Ibu dan Bapak yang telah selalu mendukung memberikan arahan terbaik, doa kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Terimakasih kepada Almamater Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga dapat melahirkan generasi-generasi terbaik dimasa depan.

RIWAYAT HIDUP

Peneliti bernama lengkap Mashuri lahir di Negeri Ratu Ngaras tanggal 9 September 1999, peneliti merupakan anak ke empat dari empat bersaudara dari Bapak Alm Hasan dan Ibu Laila Suri.

Peneliti mulai menempuh pendidikan di SDN 1 Negeri Ratu dan lulus tahun 2012, melanjutkan ke SMP N 7 Krui dan lulus tahun 2015, dan melanjutkan ke SMA N 1 Ngaras dan lulus tahun 2018..

Kemudian pada tahun 2018, peneliti melanjutkan pendidikan Keperguruan Tinggi Negeri yaitu Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama pada program studi Pemikiran Politik Islam, untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, maka peneliti menyusun skripsi dengan judul **“Implementasi Progam Kartu Prakerja Dalam Peningkatan Kompetensi Kerja Di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat”**. Semoga ilmu yang didapat selama menempuh pendidikan di UIN Raden Intan Lampung dapat bermanfaat dan dapat diterapkan dilingkungan masyarakat.

Selama menjadi mahasiswa, aktif dalam kegiatan intra maupun ekstra Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.

Bandarlampung, 15 Desember 2023

MASHURI
NPM. 1831040220

KATA PENGANTAR

Segala puji dan Syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik, hidayah, dan karunia-Nya, tidak ada daya upaya maupun kekuatan hanya dari-Nya. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. *Alhamdulillah* dengan izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Program Kartu Prakerja Dalam Peningkatan Kompetensi Kerja Di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat”, sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pelaksanaan dan penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M, Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Dr. Ahmad Isnaeni, M.A selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Abd.Qohar, M.S.I selaku Ketua Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Sekaligus pembimbing I yang dengan tulus meluangkan waktunya dan mencurahkan pemikiran untuk membimbing mengarahkan penulis serta memberikan arahan, sehingga terselesaikan skripsi yang baik dan benar dari penulis.
4. Dr. Nadirsah Hawari, Lc, MA selaku pembimbing akademik yang telah meluangkan waktu dan tenaganya dalam memberikan bimbinganm arahan maupun saran pada penyusunan skripsi ini.
5. Gesit Yudha, M.I.P selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.

6. Citra Wahyuningsih, M.S.I selaku Sekretaris Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang sudah membantu dalam proses penyelesaian skripsi.
 7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama peneliti menuntut ilmu di Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama khususnya Program Studi Pemikiran Politik Islam.
 8. Seluruh staf Kepegawaian dari tingkat Dekanat sampai tingkat bawah Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama yang telah memberikan kelancaran dalam proses penyelesaian skripsi ini.
 9. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memperkenankan peneliti literature penelitian skripsi ini.
 10. Andi Indrawara, S.Sos selaku Camat Kecamatan Ngaras beserta staf-staf nya yang telah membantu dalam proses kelancaran penulisan skripsi ini.
 11. Seluruh narasumber yang telah baik hati meluangkan waktunya serta memberikan informasi guna membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
 12. Kepada sahabatku Aris Munandar, Amirul Edwin, Julizar Marfianus, Muhammad Surya, Rohimansah, Rico Rahmat Dani Pratama yang telah menjadi teman bertukar pikiran dan berdiskusi selama penulis menempuh pendidikan.
- Semoga Allah SWT. Selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada Orang tua, Bapak dan Ibu dosen, Sahabat dan seluruh pihak yang terlibat. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini tidak lain karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan biaya yang dimiliki. Untuk itu kiranya pada pembaca dapat memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun guna melengkapi tulisan ini dan menjadikannya lebih baik lagi.

Bandarlampung, 15 Desember 2023
Penulis

Mashuri
NPM. 1831040220

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang.....	3
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	12
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Tujuan Penelitian	13
F. Manfaat Penelitian	13
G. Kajian Penelitian Terdahulu.....	14
H. Metode Penelitian	19
1. Jenis dan Sifat Penelitian	19
2. Sumber Data.....	20
a. Data Primer.....	20
b. Data Sekunder	21
3. Teknik Pengumpulan Data	22
a. Observasi	22
b. Wawancara.....	22
c. Dokumentasi.....	23
d. Pengabsahan Data.....	23
4. Analisis dan Penyajian Data	26
I. Kerangka Teori	30
J. Sistematika Pembahasan	31

BAB II IMPLEMETASI, PROGRAM KARTU PRAKERJA, KOMPETENSI KERJA

A. Pengertian Implementasi	34
B. Konsep Implemntasi Kebijakan	36
C. Progam Kartu Prakerja	41
1. Tujuan Kartu Prakerja	42
2. Syarat Kartu Prakerja.....	42
3. Solusi Progam Kartu Prakerja.....	43
4. Tahapan dalam Mengikuti Kartu Prakerja	43
D. Peningkatan Kompetensi Kerja	44
1. Peningkatan	44
2. Kompetensi.....	45
a. Karakteristik Kompetensi	46
b. Indikator Kopetensi	47
3. Kerja.....	48

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek	49
1. Profil Kantor Kecamatan Ngaras	49
2. Struktur Organisasi Kecamatan Ngaras	49
B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian	51
1. Mekanisme Progam Kartu Prakerja Di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.....	51
C. Analisis Data.....	57

BAB IV IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA DI KECAMATAN NGARAS

A. Implementasi kebijakan Kartu Prakerja dalam Peningkatan Kompetensi di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir	61
B. Kelanjutan Program Kartu Prakerja dalam Peningkatan Kompetensi Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan	86

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	93
B. Rekomendasi.....	94

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

1.1. Penerima Kartu Prakerja yang Sudah Semestinya.....	7
1.2. Penerima Kartu Prakerja yang Tidak Semestinya.....	7
1.3. Program Pemprov Lampung Berbasis Kompetensi Angkatan Pertama Tahun 2022.....	11
1.4. Data Primer	21
1.5. Data Sekunder	22
4.1 Jumlah Penerima Program Prakerja 2020-2021.....	78
4.2 Penerima Kartu Prakerja yang Sudah Mengikuti Pelatihan dan sudah sesuai Peruntukannya.....	79
4.3 Data Penerima Program yang Tidak Sesuai Peruntukannya...81	
4.4 Data Jumlah Peserta Prakerja Dalam Peningkatan Kompetensi Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan Kecamatan Ngaras 2022- 2023.....	87
5.3 Reduksi Data.....	120



DAFTAR GAMBAR

Gambar

1.1. Kerangka Teori	30
3.1. Struktur Organisasi Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.....	49
3.2 Indikator Implementasi kebijakan Edward III	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Pembuatan judul penelitian ini, peneliti menjabarkan penegasan judul. Dalam penegasan judul ini penulis memberikan pejabaran dari beberapa pengertian yang ada di judul skripsi. Ini dilakukan agar tidak ada terjadinya kesimpang siuran makna yang dapat menyebabkan salah penafsiran oleh pembaca. Judul skripsi ini yaitu “Implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja pada Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat”. Berikut ini istilah yang perlu penulis jabarkan.

“**Implementasi**”, pendapat Jones, "Those Activities directed toward putting a program into effect" merujuk pada upaya untuk menjalankan sebuah program hingga menghasilkan hasilnya. Sementara menurut Widodo, "Implementasi adalah mengadakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menghasilkan dampak pada suatu hal." Dari pandangan kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi adalah proses yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan dan program-program, melibatkan penyediaan sumber daya dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan program-program tersebut, yang dalam hal ini tentunya program kartu prakerja yang dilaksanakan di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

“**Program Kartu Prakerja**”, adalah program bantuan pemerintah atau program dari presiden Jokowi untuk memenuhi skill masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan agar mendapatkan potensi diri untuk mendapatkan lapangan pekerjaan¹, karena di dalam program bantuan prakerja sendiri mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk menumbuhkan soft skill dan mendapatkan sertifikat guna mempermudah mencari pekerjaan serta dapat membuka produk UMKM sendiri.

¹ E. Septiyadi, M. R., & Rahayu, “Program Kartu Prakerja Sebagai Program Pemberdayaan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Tengah Pandemi,” *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 2 (2022): 7.

“**Peningkatan Kompetensi Kerja**”, Emron berpendapat, kompetensi merujuk pada kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan dengan tepat dan memiliki keunggulan yang didasarkan pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan.² Di dalam program kartu prakerja, penerima kartu prakerja mendapatkan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan skil, yang tentunya ini dapat meningkatkan kompetensi kerja pada tiap-tiap individu.

“**Kecamatan Ngaras**”, Ngaras yaitu kecamatan yang terletak pada Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Sebelum tanggal 20 September 2017, wilayah ini dikenal sebagai Kecamatan Bengkurat. Didalam penelitian ini Kecamatan Ngaras sebagai lokasi penelitian untuk mengetahui sejauh mana implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Cara mendaftarkan kartu prakerja di Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan juga Kabupaten adalah yang pertama, mengarahkan peserta pendaftaran kemeja yang telah disediakan, pastikan peserta sudah memiliki email, arahkan peserta membuka situs www.prakerja.go.id untuk membuat akun, arahkan peserta foto KTP dan selfi, berikan peserta alat tulis dan kertas HVS untuk tes tulis, setelah peserta dinyatakan lolos seleksi bantu peserta memilih gelombang pendaftaran kartu prakerja, pengumuman tes seleksi dapat diihh di email peserta dan pembelian kursus atau pelatihan.

Pengawasan pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan) terhadap program ini berdasarkan Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, pemerintah memberikan dukungan penuh untuk pelaksanaan program Kartu Prakerja. Dukungan ini mencakup sosialisasi pelaksanaan program Kartu Prakerja, pengumpulan data lembaga pelatihan berkualitas di setiap daerah,

² Emron Edison, Titing Kartika, and Rida Intan Dwi Lestari, “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Di Sentra Industri Kulit Sukaregang,” *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata* 4, no. 1 (2017): 51–60.

pengumpulan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah tersebut, serta memfasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan dalam program Kartu Prakerja.

Selama ini pemuda yang mendaftar pada program kartu prakerja bermanfaat dalam edukasi pekerjaan, namun “follow up” kelanjutan atas program kartu prakerja itu diperlukan untuk meningkatkan kompetensi kerja. Kebijakan program kartu prakerja dapat bermakna dan tidak lewat begitu saja dalam kebijakan ini.

B. Latar Belakang

Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja adalah hal yang sangat penting, salah satunya melindungi dan menjamin hak dari setiap pekerja. Didalam Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”³ Hak seseorang untuk bekerja adalah hak yang sangat mendasar. Serikat pekerja dalam suatu perusahaan merupakan salah satu contoh upaya dalam rangka melindungi tenaga kerja dalam memperjuangkan, membela, dan melindungi hak-hak dari tenaga kerja.

Ada berbagai program yang diluncurkan Presiden Jokowi untuk dalam menjalani masalah di Indonesia. Kartu prakerja yang diluncurkan oleh Presiden Jokowi sebagai program pembinaan masyarakat Indonesia untuk yang belum mempunyai keterampilan dalam bekerja. Kemudian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Mahasiswa dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Kartu Prakerja digunakan agar dapat meningkatkan kompetensi kerja masyarakat di Indonesia yang berumur 18 tahun sampai 64 tahun yang dinilai lebih efektif dalam menanggulangi pengangguran dan korban pemutusan hubungan kerja akibat pandemi Covid-19.

Wabah Covid-19 (*coronavirus Disease 2019*) yang mengguncang Indonesia ditahun 2020 ini berdampak sangat buruk di semua aspek, salah satunya adalah banyaknya masyarakat

³ Pasal 28 D Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

yang kehilangan pekerjaannya. Doni Monardo selaku Ketua Gugus Percepatan Penanganan Covid-19 menjelaskan bahwa 1,6 juta pekerja Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan dirumahkan karena dampak ekonomi pandemi Covid-19.⁴ Permasalahan besar muncul di Indonesia salah satunya yakni pengangguran. Dalam waktu singkat setelah pandemi Covid-19, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat secara mencolok. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perusahaan yang mengalami kerugian dan akhirnya terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan mereka karena bangkrut.

Pemerintah melihat bahwa masih banyak pemuda di Indonesia yang belum mempunyai *skill* atau kemampuan dalam bekerja, maka pemerintah membuat suatu upaya untuk dapat meningkatkan kompetensi kerja, dengan adanya program kartu Prakerja dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

Situs web resmi www.prakerja.go.id, dijelaskan bahwa Kartu Prakerja adalah kartu identifikasi yang disediakan bagi peserta program Kartu Prakerja. Program ini merupakan inisiatif utama yang digagas oleh Joko Widodo dengan tujuan meningkatkan keterampilan kerja dan menciptakan keadilan sosial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, insentif dan pelatihan yang diberikan melalui program Kartu Prakerja merupakan jaminan sosial yang terstruktur, bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Program Prakerja secara khusus ditujukan kepada individu yang belum bekerja.

Peningkatan keterampilan dan peluang bagi individu yang mencari pekerjaan, terutama untuk pekerja atau buruh yang terpengaruh oleh pemutusan hubungan kerja (PHK). Kartu Prakerja yang menjadi jaring pengaman sosial (*safety social net*) sangat dapat menjadi solusinya. Kartu Prakerja ini mempunyai tiga sasaran; pekerja, pencari kerja, dan korban Pemutusan

⁴ <https://www.cnn-indonesia.com/ekonomi/20200413130936-92-493002/corona-tital-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>. Di Akses pada hari Senin tanggal 22 Februari 2020 pukul 15.40 Wib.

Hubungan Kerja (PHK). Yang mana dari ketiga sasaran tersebut Pemerintah akan mengadakan pelatihan agar memiliki keterampilan dalam mencari pekerjaan yang mana pelatihan tersebut ditargetkan selama 6 - 12 bulan terhadap tiga sasaran. Dalam pelaksanaannya, pemegang Kartu Prakerja akan menerima dukungan finansial sebesar Rp.3.550.000 dengan rincian tiga kali mengikuti kursus, dan manfaat akan diberikan selama empat bulan, sementara insentif untuk mengisi survei akan dicairkan tiga kali. Pelatihan ini akan diselenggarakan secara daring.

Meningkatkan keterampilan kerja di Indonesia harus terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, pemerintah mengambil inisiatif dengan meluncurkan program Kartu Prakerja, yang diatur dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Pendekatan ini juga dapat ditemukan dalam banyak sumber, seperti dalam kitab al-Ahkam ash Shulthaniyah karya Imam Mawardi dan kitab al-Kharaj karya Abu Yusuf. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada ajaran Allah SWT, seperti yang terdapat dalam Surah An-Nisa ayat 135.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ
 أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْنَا أَوْ
 تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa [4]: 135)⁵

Ayat ini menyatakan bahwa Allah memerintahkan untuk bertindak adil kepada semua manusia. Hai orang-orang yang beriman! Hendaklah kamu menjadi penegak keadilan yang tulus di antara seluruh umat manusia, menjadi saksi yang jujur karena Allah, tanpa memandang status sosial, termasuk dirimu sendiri atau orang-orang yang sangat dekat denganmu, seperti orang tua dan kerabatmu. Jangan biarkan faktor-faktor pribadi tersebut menghalangi kamu untuk bertindak adil. Jika terdakwa tersebut kaya, jangan tergoda oleh kekayaannya, dan jika ia miskin, jangan merasa kasihan karena kemiskinannya, karena Allah lebih mengetahui apa yang paling baik dan bermanfaat.

Tafsir ayat tersebut tentunya berkaitan dengan implementasi kebijakan pada program kartu prakerja, dengan adanya persyaratan yang disediakan oleh pemerintah maka harapannya tidak ada ketidakadilan bagi penerima program kartu prakerja. Selain itu, tidak pula ada diskriminasi pada pendaftar ataupun penerima program kartu prakerja. Kebijakan yang telah disediakan seharusnya tetap untuk dijalankan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

Dari hasil pra-penelitian oleh penulis, diperoleh data jumlah pemuda penerima kartu Prakerja di Kecamatan Ngaras belum berjalan maksimal yakni 150 orang dari jumlah keseluruhan penerima kartu prakerja di Kabupaten Pesisir Barat yakni sebanyak 1834 orang dan untuk keseluruhan penerima kartu prakerja di provinsi Lampung adalah 146765 penerima. Dan rata-rata mereka baru mengikuti pelatihan 1 kali. Adapun data penerima kartu prakerja di Kecamatan Ngaras adalah sebagai berikut :⁶

⁵ QS. An-Nisa [4]: 135

⁶ Andi Indrawara “Camat di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat” , *Wawancara, 17 Maret 2023. Pukul 09.00 WIB.*

Tabel. 1.1. Penerima Kartu Prakerja yang Sudah Semestinya

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENERIMA KARTU PRAKERJA	KETERANGAN
1.	Pardasuka	15 Orang	Usia Diatas 18 Tahun
2.	Sukarame	12 Orang	Sda
3.	Sukamaju	13 Orang	Sda
4.	Rajabasa	14 Orang	Sda
5.	Mulang Maya	12 Orang	Sda
6.	Padang Dalam	14 Orang	Sda
7.	Bandar Jaya	12 Orang	Sda
8.	Kota Batu	13 Orang	Sda
9.	Negri Ratu Ngaras	15 Orang	Sda
	Total	120 Orang	Sudah sesuai usia dan peruntukannya

Sumber: data dari kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

Dari jumlah total keseluruhan tersebut diatas rata-rata mereka sudah mengikuti pelatihan 1x, hal ini belum dapat menjadikan para pemuda mempunyai skill yang kompeten yang diharapkan pemerintah sesuai dengan tujuan dari progan kartu prakerja itu sendiri.

Tabel. 1. 2. Penerima Kartu Prakerja yang Tidak Semestinya⁷

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENERIMA KARTU PRAKERJA	KETERANGAN
1.	Pardasuka	4 Orang	Usia dibawah 18 Tahun
2.	Sukarame	4 Orang	Usia diatas 64 Tahun

⁷ Andi Indrawara “Camat di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat” , *Wawancara, 17 Maret 2023. Pukul 09.00 WIB.*

NO	NAMA DESA	JUMLAH PENERIMA KARTU PRAKERJA	KETERANGAN
3.	Sukamaju	3 Orang	Sedang mengikuti pendidikan formal
4.	Rajabasa	2 Orang	Tidak mempunyai KTP
5.	Mulang Maya	3 Orang	Pejabat negara
6.	Padang Dalam	5 Orang	Sudah mempunyai pekerjaan
7.	Bandar Jaya	3 Orang	Usia diatas 64 Tahun
8.	Kota Batu	3 Orang	Usia dibawah 18 Tahun
9.	Negri Ratu Ngaras	3 Orang	Sudah mempunyai pekerjaan
	Total	30 Orang	Tidak sesuai usia dan peruntukannya

Sumber: data dari kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 11 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 yang telah mengalami perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja, terdapat beberapa revisi. Awalnya, program Kartu Prakerja ditujukan untuk meningkatkan kompetensi, produktivitas, dan daya saing angkatan kerja, tetapi sekarang juga memberi prioritas kepada pekerja dan pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak oleh pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan serta untuk pengembangan kewirausahaan.

Menurut Donald. L. Kirkpatrick ada empat indikator kompetensi kerja, yakni skill, jaringan (*contruction*), wadah

(*organisation*), relevan dengan kompetensi kerja. Dalam teori ini evaluasi pelatihan dapat dilakukan dalam empat level, yakni :⁸

1. Reaksi (*reaction*)

Pada level ini perusahaan melalui tim learning and development (L&D) meminta masukan dari berbagai pihak tentang pengalaman belajar setelah menerima pelatihan atau kursus. Hal ini lebih mengerucut terhadap kepuasan peserta pelatihan. Apakah peserta merasa pelatihan relevan dengan tugas sehari-hari atau tidak.

2. Pembelajaran (*learning*)

Pada level ini, evaluasi mengedepankan pada tingkat pengetahuan peserta terhadap materi yang disampaikan. Apakah materi yang disampaikan dapat diterima peserta dengan baik ? apakah cara penyampaiannya sudah ideal .

3. Prilaku (*behavior*)

Pada level ini, mengukur perubahan sikap dan prilaku pada peserta pelatihan. Perubahan prilaku diukur menggunakan dasar pelatihan dan keterampilan yang selaras dalam peningkatan performa dipekerjaan. Perubahan prilaku ini sifatnya dapat subyektif, karena faktor perubahan dapat muncul secara subyektif dari dalam diri peserta masing-masing.

4. Outout/ Hasil (*result*)

Pada level ini menekankan pada basil nyata pelatihan, missal nya apakah progam pelatihan mampu memberikan dampak terhadap penurunan biaya, peningkatan produktifitas dalam pekerjaan, peningkatan kualitas dan efesiensi karyawan.

Ketika menjalankan program ini, ada hambatan atau masalah yang muncul karena pemerintah belum sepenuhnya mempersiapkan peningkatan mekanisme basis data penerima yang dituju. Kurang memperhatikan kemampuan masyarakat yang mempunyai sumber daya manusia yang masih rendah dalam literasi digital, dan masih sangat minimnya masyarakat

⁸ Yeti Nurhayati. Penerapan Model Kirkpatrick untuk Evaluasi Program Diklat Teknis Subtantif Materi Perencanaan Pembelajaran Di Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau. *Andragogi Jurnal Diklat Teknis*. Volume: VI No. 2 Juli – Desember 2018. H. 172

mempunyai sarana elektronik seperti ponsel android dan laptop. Beberapa permasalahan manajemen kebijakan kartu Prakerja, Ini adalah tugas pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran.

Kendala ataupun permasalahan yang terjadi menurut penulis tidak terlepas karena masih lemahnya pelaksanaan kebijakan program kartu prakerja ini dilapangan khususnya di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, adapun kelemahan-kelemahan tersebut yakni :

1. Pemuda penerima kartu prakerja tidak diarahkan ke Industri unggulan;
2. Kurangnya sosialisasi kepada pemuda penerima kartu prakerja terkait skill apa yang dibutuhkan oleh industri potensial;
3. Desain dan isi pelatihan yang diberikan kepada pemuda yang menerima kartu prakerja belum dapat menjamin bahwa ketrampilan atau skill yang diperlukan akan sepenuhnya terpenuhi.;
4. Jauhnya jarak lokasi untuk melakukan pelatihan berbasis kompeten.

Bersamaan munculnya permasalahan yang dialami oleh masyarakat, maka pemerintah menyediakan dan melakukan kerjasama dengan BLK Bandar Lampung pada tahun 2022. Kegiatan pelatihan berbasis kompetensi dilaksanakan dengan cara memetakan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dengan pelatihan yang akan diikuti. Hal ini tentunya berguna pada output yang dihasilkan. Masyarakat dapat langsung menerapkan ilmu atau keahlian yang telah didapatkan pada dunia kerja.

Hal inilah yang melatarbelakangi dinas ketenagakerjaan membuka pelatihan berbasis kompetensi bagi masyarakat. Dengan adanya program tersebut, harapannya masyarakat dapat meningkatkan nilai peatihan dan mutu pada sumber daya manusia didaerah setempat.

Berdasarkan data yang sudah diperoleh bahwa terdapat kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk 6 jurusan dengan total 96 orang, dimana setiap jurusan akan diikuti oleh 16 peserta. Untuk tahun ini ada 3 angkatan dimana angkatan pertama didukung dengan APBD dan angkatan kedua dan ketiga dari

APBN. Dalam angkatan pertama ini terdapat 6 jurusan pelatihan yang akan dibuka, berikut tabelnya :

Tabel 1.3. Program Pemprov Lampung berbasis Kompetensi Angkatan Pertama Th. 2022

NO	JENIS PELATIHAN	JUMLAH PESERTA PELATIHA N	SYARAT PENDAFTA RAN	KETERANGAN
1.	Computer operator asisten(TIK)	16 orang	-Minimal izasah SMP,KTP,pas foto,berusia 18-40 tahun.	-Peserta yang mendaftar dapat mendaftarkan diri di website <i>sigajahlatih.disnaker.lampungprov.go.id.</i> yang dimulai sejak 9-22 Februari 2022.
2.	Tehnik las.	16 orang		
3.	Pemeliharaan kendaraanring an system injeksi/teknik otomotif.	16 orang		
4.	Perhotelan.	16 orang		
5.	Pengelolaan administrasi perkantoranbis nis.	16 orang		
6.	Manajemen.	16 orang		
TOTAL	6 Jurusan	96 orang		-ada tes tertulis tanggal 23 Februari 2022. -pelaksanaan pelatihan dimulai tanggal 1 Maret - 12 April 2022 dengan waktu pelatihan senen-jumat dengan penerapan protocol yang ketat. -setelah pelatihan, peserta mendapat sertifikat.

Data tabel diatas dapat dijadikan sebagai pembanding dalam pelaksanaan progan kartu prakerja di Kecamatan Ngaras. Disini pentingnya pemerintah di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat memetakan keahlian yang dibutuhkan industri atau dimana para pemuda itu bekerja agar pelatihan yang dilaksanakan tidak sia-sia dan benar-benar selain meningkatkan kompetensi kerja juga dapat mengurangi jumlah pengangguran di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Maka dari itu, Peran penting pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelaksanaan program Kartu Pra-Kerja dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Undang-undang ini menyatakan bahwa pelayanan publik adalah “serangkaian kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan warga negara dan penduduk akan barang, jasa, dan/atau layanan administratif, yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public.”

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, peneliti merasa tertarik untuk melaksanakan penelitian yang berjudul. “**Implementasi Progam Kartu Prakerja Dalam Peningkatan Kompetensi Kerja Di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.**”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implementasi Progam Kartu Prakerja dalam Peningkatan Kompetensi Kerja pada Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

Adapun sub fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Impelementasi kebijakan program kartu prakerja menggunakan teori Edward III
2. Pelaksanaan mekanisme progam kartu prakerja Tahun 2020-2021;

D. Rumusan Masalah

Mengacu pada pengenalan latar belakang masalah di atas, masalah yang akan dijabarkan dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja dalam Peningkatan Kompetensi di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat?
2. Bagaimanakah Kelanjutan Program Kartu Prakerja dalam Peningkatan Kompetensi Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan?

E. Tujuan penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, implementasi kebijakan Kartu Prakerja dalam peningkatan kompetensi di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.
2. Untuk mengetahui, kelanjutan program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja oleh dinas ketenagakerjaan.

F. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan bagi peneliti dari hasil penelitian karya ilmiah ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Meningkatkan pemahaman dan wawasan akademisi tentang pelaksanaan kebijakan program prakerja dalam meningkatkan kompetensi kerja.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis pada penelitian ini akan diberikan kepada masyarakat secara umum dan masyarakat kecamatan Ngaras secara khusus.

- a. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi yang dapat digunakan oleh peneliti di masa depan yang akan melakukan penelitian dalam bidang yang sama untuk kemajuan ilmu pengetahuan.
- b. Bagi Pemerintah

Peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai pertimbangan, bahan masukan serta

rekomendasi untuk pemerintah dalam meningkatkan pelayanan.

c. Bagi Masyarakat

Peneliti berharap penelitian ini menjadi pendorong dan membuka pandangan agar kedepannya banyak masyarakat yang memanfaatkan program kartu prakerja.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Untuk mendukung pembahasan dan penjelasan di atas, peneliti berupaya untuk mengumpulkan literatur dari penelitian sebelumnya yang masih relevan dengan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk mengonfirmasi penelitian dan juga sebagai bahan pendukung dalam mengembangkan kerangka teoritis untuk penelitian ini. Hasil pencarian literatur dari berbagai penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Skripsi dengan judul “Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Denai Kota Medan” Karya Dinda Siti Rachma Fakultas syari’ah dan hukum universitas islam negeri sumatera utara, Skripsi ini berfokus pada mekanisme dan pelaksanaan agar bisa mendapatkan terdaftar dalam program bantuan Prakerja serta skripsi ini juga membahas tentang bagaimana efektifitas bagi masyarakat yang sudah mendapatkan program bantuan prakerja dan juga skripsi ini membahas tentang pengawasan pemerintah dinas ketenagakerjaan terhadap masyarakat yang telah mendapatkan program kartu Prakerja Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kartu Prakerja telah berjalan dengan baik, dengan masyarakat memahami persyaratan dan proses pendaftarannya. Namun, efektivitas program ini belum mencapai tingkat yang diharapkan dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan) masih belum optimal, dan dampak dari Program Kartu Prakerja sangat terlihat dalam membantu perekonomian masyarakat, terutama di Kecamatan Medan Denai, Kota

Medan.⁹ Perbedaan skripsi karya Dinda Siti Rachma dengan skripsi yang penulis teliti ini terletak objek yang diteliti. Pada skripsi Dinda meneliti mengenai tinjauan terhadap pelaksanaan program kartu prakerja, sedangkan pada skripsi ini peneliti akan meneliti implementasi yang ada pada program prakerja di kecamatan Ngaras.

2. Skripsi yang berjudul “Evaluasi Progam Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas” Karya Adetya Firnanda Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Skripsi ini difokuskan pada penilaian aspek manfaat dan aksesibilitas untuk menentukan sejauh mana Program Kartu Prakerja memenuhi tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dengan menerapkan studi kepustakaan serta studi lapangan yang mencakup wawancara. Pembahasan dalam penelitian ini terkait Progam Kartu Prakerja yang diluncurkan pemerintah, Apakah kebijakan pemerintah ini tepat, dan apakah manfaat dari Program Kartu Prakerja sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia? Meskipun program ini telah memberikan manfaat, belum semua warga dapat merasakan manfaat dan aksesibilitas Program Kartu Prakerja ini, seperti yang terlihat di Kabupaten Sampang. Wawancara dilakukan dengan informan yang berasal dari Kabupaten Sampang dan Kabupaten Blitar. Hasil wawancara dengan informan dari Kabupaten Sampang menyoroti masalah aktivasi akun Kartu Prakerja dan masalah sinyal yang tidak stabil yang mengganggu proses mengerjakan tugas.¹⁰ Perbedaan karya skripsi Karya Adetya Firnanda ini dengan skripsi penulis terletak pada metode penelitian. Disini menggunakan metode penelitian normative sedangkan di skripsi yang penulis teliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

⁹ Dinda Siti Rachma. Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Progam Kartu Prakerja Di Kecamatan Denai Kota Medan. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. 2020.

¹⁰ Adetya Fernanda. Evaluasi Program Kartu Prakerja Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Dan Aksesibilitas Di Kota Surabaya. Jurnal Hukum Magnum Opus Volume 4 Nomor 2 Agustus 2021.

3. Skripsi yang berjudul “Pengaruh Progam Kartu Prakerja Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Masa Pandemi COVID-19 “ Karya Risni Sinaga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri, skripsi terfokus pada dampak adanya pandemi Covid-19 antara lain pemutusan hubungan kerja (PHK) yang menimbulkan semakin banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia. Metode pemilihan sampel yang diterapkan adalah Simple Random Sampling dengan menyebarkan kuesioner kepada masyarakat yang menerima kartu prakerja pada tahun 2020 di Kabupaten Banyumas. Total responden yang diambil sebanyak 97 orang. Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis regresi linier sederhana. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja memiliki dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat.¹¹Perbedaan skripsi karya Risni Sinaga dengan skripsi yang penulis teliti cukup banyak perbedaannya yakni pada fokus penelitiannya di skripsi Risni terfokus tentang akibat dari wabah covid-19 , yakni pemutusan hubungan kerja (PHK), sedang di skripsi yang penulis teliti terfokus pada implementasi progam kartu prakerja di Kecamatan Ngaras. Pada skripsi yang ditulis oleh Risni, metode pemilihan sampel yang digunakan adalah Simple Random Sampling, dan kuesioner telah didistribusikan kepada masyarakat penerima kartu prakerja tahun 2020 di Kabupaten Banyumas. Sedang di skripsi yang penulis teliti metode yang digunakan dalam pengumpulan data melalui data Sekunder dan data Primer yakni data didapat dari studi pustaka, observasi dan melakukan wawancara terhadap bebrapa narasumber di Kantor Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.
4. Jurnal *Public Administration Journal Vol 02 No. 02* Yang Berjudul Kajian Pelaksanaan Program Kartu Prakerja Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten

¹¹Risni Sinaga, pengaruh program kartu prakerja terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi covid-19 di kota Banyumas. Universitas Islam Negeri Prof. Kh. Saifuddin Zuhri Purwokerto. 2020. H. 34

Bandung. Karya Ni Komang Ayu Indra Yanti dkk (2020). Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Program Kartu Prakerja mampu memberikan dukungan secara fisik dan materiil serta memberikan dukungan secara mental dan spiritual kepada komunitas. Dibutuhkan pelaksanaan program secara konsisten dan peran asisten tidak ada, masih minimnya insentif yang diberikan dan belum mencukupi untuk modal usaha.¹² Perbedaan karya Ni Komang Ayu dkk dengan skripsi yang penulis teliti adalah terletak pada metode penelitiannya, jika skripsi karya Ni Komang Ayu ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Namun, dalam skripsi yang saya teliti, digunakan metode penelitian kualitatif.

5. Jurnal penelitian *Smeru Vol 01 No. 03* yang berjudul “Kartu Prakerja Di Tengah Pandemi Covid-19 : Asesmen Cepat Dari Sudut Pandang Peserta Progam”. Karya Palmira Permata Bachtiar dkk (2020). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ada penerima Program Kartu Prakerja yang, meskipun tidak mengikuti pelatihan, tetapi sangat memerlukan bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, terutama karena dampak pandemi Covid-19. Kelompok ini sebenarnya tidak termasuk dalam golongan miskin dan tidak memenuhi syarat sebagai penerima bansos reguler seperti PKH.¹³ Perbedaan karya Palmira Permata dkk dengan skripsi yang penulis teliti ini terletak pada program. Pada skripsi karya Palmira ini membahas tentang program bansos sedangkan di skripsi yang penulis teliti membahas tentang program kartu prakerja.
6. Jurnal penelitian "Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Vol. 18 No. 02" yang berjudul "Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Akibat Pandemi

¹²Ni Komang Ayu Indra Yanti dkk, “kajian pelaksanaan program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga” di kabupaten bandung. *public administration journal vol 02 no. 02*. H. 3

¹³Palmira PermataBBachtiar dkk, kartu prakerja di tengah pandemi covid-19: asesmen cepat dari sudut pandang peserta program. *Smeru Vol 01 No. 03*. H. 5

Covid-19," yang disusun oleh Siti Indayani & Budi Hartono (2020), mencatat bahwa dampak pandemi Covid-19 telah menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi melambat hingga mencapai 2,97% (year on year) berdasarkan hasil penelitian mereka. Angka pengangguran di Indonesia juga meningkat, yang mana ini dapat menyebabkan deficit anggaran Negara bertambah.¹⁴ Perbedaan karya Siti Indayani dan Budi Hartono terdapat pada fokus penelitian. Jika pada karya Siti dkk ini terfokus pada dampak dari Covid-19 sedangkan pada skripsi yang penulis teliti terfokus pada implementasi program kartu prakerja. Pada karya Siti dkk menggunakan metode kuantitatif sedang pada skripsi yang penulis teliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

7. Jurnal penelitian *Journal of Government and Political studies Volume 3 Nomor 2* yang berjudul "Mengkaji Upaya Pemerintah Melalui Program Kartu Prakerja Dalam Perspektif Pemberdayaan Di Masa Pandemi Covid-19". Hasil penelitian yang dilakukan oleh Toni Predianto & Khoirrosyidin (2020) mengindikasikan bahwa Program Kartu Prakerja dapat berfungsi sebagai alat yang menghubungkan masyarakat dengan berbagai jenis pelatihan keterampilan yang baru. Namun, disayangkan tidak semua warga masyarakat berkesempatan mengakses peluang ini dengan baik karena adanya keterbatasan kuota dalam setiap gelombang dan juga penerapan sistem seleksi berdasarkan tahapan-tahapan.¹⁵ Perbedaan karya Toni dkk yaitu terdapat pada metode penelitian. Pada karya Toni dkk menggunakan metode penelitian kuantitatif sedangkan skripsi yang penulis teliti menggunakan metode penelitian kualitatif.

¹⁴Siti Indayani & Budi Hartono, Analisis Pengangguran Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi COVID-19. Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika .Vol. 18 No. 02. H. 7

¹⁵ Toni Predianto & Khoirrosyidin, mengkaji upaya pemerintah melalui program kartu prakerja dalam perspektif pemberdayaan di masa pandemi covid-19. *Journal of Government and Political studies Vol. 3 No. 2. H. 5*

H. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah pendekatan komprehensif untuk mengumpulkan data yang diperlukan, dan merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan penelitian. Berikut adalah metode yang diterapkan oleh peneliti dalam skripsi ini:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian lapangan, yang artinya penelitian ini dilakukan di dalam situasi kehidupan nyata. Metode penelitian lapangan ini pada dasarnya bertujuan untuk secara khusus dan nyata menggambarkan apa yang terjadi di tengah masyarakat.¹⁶ Tujuan dari penelitian lapangan adalah untuk merinci dan memahami situasi saat ini, serta interaksi dengan lingkungan dalam unit sosial, baik itu individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat secara spesifik.¹⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis menggunakan metode ini karena ingin mendapatkan gambaran di lapangan tentang implementasi program bantuan prakerja dari pemerintah untuk meningkatkan kompetensi kerja. Dalam hal ini data yang diperoleh dari Kantor Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki pendekatan deskriptif, yang berarti bahwa penelitian ini bertujuan untuk menguraikan keadaan yang sedang berlangsung saat penelitian dan menganalisis penyebab dari suatu gejala tertentu.¹⁸ Skripsi ini nantinya akan memaparkan atau menggambarkan implementasi program bantuan prakerja dari pemerintah di kecamatan Ngaras.

¹⁶Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju 1996), h. 32

¹⁷Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Remaja Rosdakarya 2013), h. 46

¹⁸Imam Suprayogo dan Tabroni, Metodologi Penelitian Sosial-Agama, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2003), h. 71.

2. Sumber Data

Penelitian kualitatif, fokus utamanya adalah pada aspek kualitas dan proses aktivitas subjek yang sedang diselidiki, sehingga diperlukan sumber data yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait permasalahan yang diteliti. Adapun sumber datanya adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Sesuai dengan pandangan Sugiyono, data primer merujuk pada informasi atau catatan yang berasal dari saksi mata yang telah secara langsung menyaksikan suatu peristiwa.¹⁹ Dalam konteks ini, peneliti mengumpulkan data secara langsung dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi individu bersama Bapak Camat di Kantor Kecamatan Ngaras, Tokoh adat dan masyarakat Ngaras serta Ketua Karang Taruna, pemuda di Kecamatan Ngaras. Adapun tehnik pengambilan informan dipenelitian dengan menggunakan tehnik *Snowball sampling* dimana penetapan sampel atau informan rujukan berantai, dimana subjek yang ada memberikan rujukan dalam merekrut sampel yang dibutuhkan untuk studi penelitian. Teknik ini mampu memberikan data yang memuaskan. Sampel mempunyai kreteria seperti pegawai di Kantor Kecamatan Ngaras dan para pemuda di Kecamatan Ngaras yang telah mendapatkan Kartu Prakerja. Berdasarkan tehnik diatas yang menjadi sumber informan data primer diantaranya adalah :

¹⁹ Sugiyono, Metodologi Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfabeta, 2013),h.308

Tabel 1.4. Data Primer

No	Nama	Keterangan	Tempat/Tanggal Wawancara
1	Andi Indrawara, S.Sos.	Camat Ngaras	Di Kantor Kecamatan Ngaras
2	Para Pemuda Penerima Kartu Prakerja	Di Kecamatan Ngaras	SDA
3	Drs. Berdi Syaputra	Tokoh adat dan masyarakat kecamatan Ngaras	SDA
4	Budi Irawan, S.Pd.	Ketua karang taruna kecamatan Ngaras	SDA
5	Mellynda	Masyarakat Pendaftar Kartu Prakerja	Rumah Mellynda
6	Siska Hasanah	Masyarakat Pendaftar Kartu Prakerja	Rumah Siska
7	Ali Husein	Masyarakat penerima Program Prakerja	Di Kantor Kecamatan Ngaras
8	Subekti	Masyarakat Pendaftar Kartu Prakerja	Rumah Subekti
9	Kardianto	Pegawai dinas ketenagakerjaan	Kantor dinas ketenagakerjaan

b. Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari literatur atau studi pustaka, berbagai sumber literatur termasuk juga penelitian terdahulu yang relevan. Ini juga bisa diinterpretasikan sebagai data yang terdokumentasikan dalam bentuk berbagai dokumen.²⁰ Data sekunder adalah data yang telah ada atau dipublikasikan oleh instansi atau lembaga yang mengumpulkan, mengolah, dan menyediakan data tersebut untuk umum.²¹ Dalam penelitian ini, data sekunder

²⁰Ibid, hlm. 94

²¹Hadi Sutrisno, Metodologi Research, (Jogjakarta :YPPFAK, Psikologi UGM,1985),hlm. 89

mencakup berbagai jenis informasi seperti arsip, foto, dan dokumentasi kegiatan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Tabel 1.5 Data Sekunder

No	Nama Data	Sifat Data
1	Kantor Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.	Arsip di Kantor Kec. Ngaras
2	Daftar Pegawai Kantor Kecamatan Ngaras	Arsip di Kantor Kec. Ngaras
3	Daftar Pemuda yang Sudah mendapatkan Kartu Prakerja	Arsip di Kantor Kec. Ngaras
4	Peraturan-peraturan terkait Progam Kartu Prakerja	Arsip di Kantor Kec. Ngaras

3. Tehnik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pengamatan langsung di lapangan dan pencatatan sistematis mengenai fenomena yang menjadi objek penelitian. Observasi dilakukan dengan menggunakan indera, terutama penglihatan, terhadap kejadian yang dapat langsung diamati saat peristiwa itu terjadi. Observasi dalam penelitian ini dilakukan mulai tanggal 26 Mei 2022 hingga penelitian selesai.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode interaksi tanya jawab dalam penelitian, yang melibatkan komunikasi lisan di mana dua orang atau lebih bertemu dan mendiskusikan informasi atau keterangan secara langsung. Dalam penelitian ini, jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yang merupakan gabungan dari wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Wawancara bebas adalah sebuah proses di mana pewawancara dengan sengaja mengarahkan pertanyaan-pertanyaan pada inti permasalahan yang menjadi fokus

penelitian. Di sisi lain, wawancara terpimpin juga dikenal dengan istilah "interview guide" atau "controlled interview," di mana terdapat panduan berisi pokok-pokok masalah yang akan diteliti. Wawancara terpimpin memiliki karakteristik bahwa pewawancara terikat pada peran tertentu, yaitu sebagai pengumpul data yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah disiapkan, dan terdapat panduan wawancara yang memandu jalannya proses tanya jawab.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan buku-buku yang mencakup pendapat, teori, dalil, serta hukum-hukum yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan.²² Dokumen-dokumen yang ditemukan oleh peneliti termasuk buku-buku, surat, dan dokumen-dokumen yang terkait dengan antusiasme warga Kecamatan Ngaras dalam menerima program bantuan prakerja dari pemerintah.

d. Pengabsahan Data

Untuk memastikan keandalan data yang diperoleh, diperlukan langkah-langkah untuk memeriksa keabsahannya. Pada penelitian ini, teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas data adalah teknik triangulasi, yaitu penggunaan berbagai metode pengumpulan data yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memverifikasi hasil temuan penelitian dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.

Triangulasi teknik data mengacu pada penggunaan beragam metode pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama, seperti observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sementara itu, triangulasi sumber mencakup pengumpulan data dari berbagai sumber yang berbeda, namun menggunakan

²²Haidar Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Jogjakarta: Garma Press,1987),h.133

metode pengumpulan data yang serupa. Dalam konteks pengujian kredibilitas, triangulasi melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber, menggunakan berbagai metode, dan mengumpulkan data pada berbagai waktu. Dengan demikian, konsep triangulasi mencakup tiga dimensi utama: triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu, sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh Sugiyono (2016).²³

a. Triangulasi Sumber

Fungsi dari Triangulasi sumber itu sendiri adalah untuk menguji kredibilitas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- 1) Memverifikasi data yang telah diperoleh dari beberapa sumber, sebagai contoh untuk menilai kepercayaan informasi mengenai pelaksanaan Program Kartu Prakerja untuk meningkatkan kompetensi kerja di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, Oleh karena itu, data yang telah dikumpulkan dan diuji berasal dari penerima Kartu Prakerja yang diserahkan kepada Pemerintah dalam hal ini Bapak Camat Kecamatan Ngaras sebagai pelaksana program, dan tempat pelatihan kerja yang merupakan tempat peningkatan kompetensi kerja para penerima kerja serta tokoh masyarakat, tokoh pemuda di Kecamatan Ngaras sebagai orang-orang yang mengetahui adanya pelaksanaan Program Kartu Prakerja tersebut.
- 2) Data dari ketiga sumber tersebut dideskripsikan, dan dikelompokkan
- 3) Kemudian, peneliti menganalisis data untuk mencapai suatu simpulan, yang selanjutnya akan

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta : Bandung, 2013), 241

diminta persetujuan dari tiga sumber data tersebut.²⁴

Triangulasi mempunyai tujuan meningkatkan kekuatan teoritis, metodologi, ataupun interpretatif pada sebuah penelitian. Dalam kriteria verifikasi data di atas, peneliti membandingkan hasil wawancara dengan setiap narasumber yang berlokasi di tempat penelitian., diantaranya adalah Bapak Camat Kecamatan Ngaras, Ketua Karangtaruna Ngaras, serta para pemuda penerima Kartu Prakerja di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

b. Triangulasi Teknik

Rangka menguji kredibilitas data, triangulasi digunakan dengan cara memverifikasi data yang berasal dari sumber yang sama, namun menggunakan metode yang berbeda. Misalnya, data yang diperoleh dari wawancara diperiksa melalui observasi dan dokumentasi. Apabila ketiga metode verifikasi kredibilitas tersebut menghasilkan data yang berbeda, peneliti akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber data untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau mungkin semua data tersebut benar, karena perbedaan sudut pandang yang digunakan oleh peneliti dalam teknik ini untuk mengumpulkan data dari para pemuda yang telah menerima Kartu Prakerja di Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

c. Triangulasi waktu

Pemilihan waktu yang tepat juga sering memengaruhi keandalan data yang dikumpulkan. Misalnya, menerapkan metode wawancara pada pagi hari ketika narasumber masih segar, belum terlalu terganggu oleh aktivitasnya, dapat menghasilkan data yang lebih valid dan kredibel. Oleh karena itu, dalam rangka menguji

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta : Bandung, 2013), 241

kredibilitas data, perlu dilakukan pengecekan dengan metode wawancara, observasi, atau teknik lainnya. Jika hasil pengujian menghasilkan perbedaan, maka proses ini harus diulang beberapa kali untuk memastikan keakuratan data.

Penulis menggunakan triangulasi sumber data dalam menulis skripsi ini. Triangulasi data digunakan untuk menggali data kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Peneliti menggunakan data melalui wawancara dengan beberapa informan terkait dan melakukan observasi langsung dengan masyarakat sebagai peserta program prakerja. Dari data yang diperoleh, setiap informan memiliki cara yang berbeda untuk membuktikan dan memberikan pandangan mengenai program prakerja yang ada di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Dari berbagai pandangan yang didapatkan oleh penulis akan melahirkan data untuk penelitian ini.

4. Analisis dan penyajian data

Seidel dalam buku Metode Penelitian Kualitatif (Moleong) menjelaskan bahwa analisis data adalah usaha untuk menghasilkan catatan lapangan yang diberi kode, sehingga sumber data tetap dapat dilacak. Proses ini melibatkan pengumpulan, pemilihan, klarifikasi, intensifikasi, penyusunan ringkasan, dan pembuatan indeks data, serta pemikiran untuk membuat kategori data memiliki makna. Tujuannya adalah untuk menemukan pola dan hubungan, serta menyusun temuan umum. Dengan demikian, analisis data merupakan suatu proses pengorganisasian dan pengelompokan data ke dalam pola, serta pengkategorian sumber data, dengan maksud untuk secara sistematis meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang sedang diteliti, sehingga hasil analisis dapat disajikan sebagai temuan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Miles dan Huberman menyatakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkelanjutan

hingga data mencapai saturasi. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan metode analisis deskriptif kualitatif dengan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang cukup banyak dikumpulkan dengan cara menyatukannya secara rinci dan juga teliti. Reduksi data juga berarti memilih hal pokok, merangkum, dan membuang hal yang tidak perlu serta memfokuskan pada hal yang penting.²⁵

Pada tahapan pertama ini data yang didapat dari lapangan penelitian, harus di tulis secara rinci untuk selanjutnya di sederhanakan dan di filter pada data yang sudah tersedia, sejak sebelum berlangsungnya penelitian sampai dengan berlangsungnya penelitian. Tahapan ini penulis melakukan wawancara secara langsung kepada informan untuk mengumpulkan data, yang kemudian data yang sudah diperoleh di catat secara lengkap dan rinci. Peneliti melakukan pemilahan data yang diperoleh dari penelitian, mencakup data mengenai masyarakat yang mendaftar untuk program Kartu Prakerja dan melanjutkan dengan pelatihan. Selain itu, penulis juga menghimpun informasi mengenai manfaat dan dampak negatif yang dirasakan oleh masyarakat akibat keberadaan program Kartu Prakerja ini. Setelah itu, penulis mengumpulkan data-data yang lebih spesifik yang nantinya akan digunakan dalam penulisan skripsi ini. Kegiatan ini berlangsung selama secara terus-menerus selama masa penelitian.

Reduksi data merupakan jenis analisis yang bertujuan untuk menyempitkan, mengelompokkan, memusatkan, menghapus, dan mengorganisasi data dengan teliti. Proses ini dilakukan untuk mencapai kesimpulan akhir yang dapat diambil dan diverifikasi. Pada tahap ini, data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah melalui seleksi, parafrase, dan teknik lainnya.

²⁵ Hardani DKK, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, ed. Yogyakarta, (CV . Pustaka Ilmu Group, 2021).

b. Penyajian Data

Penyajian data bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola yang signifikan, memungkinkan penarikan kesimpulan, dan merumuskan tindakan yang tepat. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data memiliki tujuan untuk menemukan makna dari data yang telah dikumpulkan, kemudian menyusunnya secara terstruktur. Informasi kompleks diubah menjadi bentuk yang lebih sederhana namun tetap selektif untuk memberikan gambaran yang jelas dan relevan.

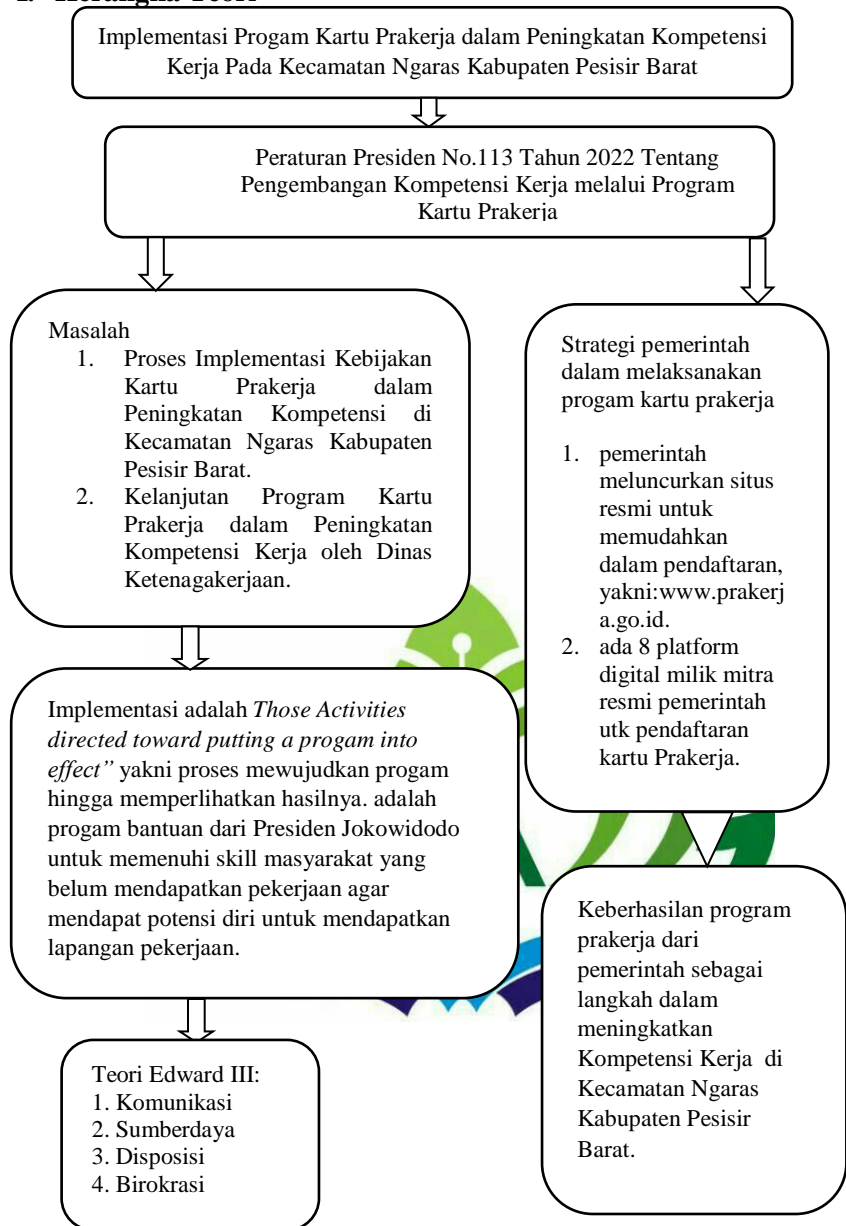
Data berikut merupakan jumlah pendaftar program kartu prakerja, data sesuai atau tidaknya persyaratan dengan penerima kartu prakerja, data kepuasan masyarakat terhadap adanya program prakerja, dan data mekanisme pendaftaran program kartu prakerja.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah proses penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sejak awal, peneliti berupaya mencari makna dalam data yang telah dikumpulkannya. Kesimpulan pada tahap awal seringkali masih kabur dan bersifat sementara, dan dapat berubah jika tidak ada bukti yang kuat yang mendukungnya dalam tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, jika kesimpulan yang diajukan pada awalnya didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data lebih lanjut, maka kesimpulan tersebut menjadi kredibel. Oleh karena itu, kesimpulan harus terus diverifikasi selama penelitian berlangsung.

Pada penelitian kualitatif, kesimpulan yang diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut bisa berupa deskripsi atau gambaran yang lebih jelas tentang suatu objek yang sebelumnya kurang dipahami. Dengan data yang telah disajikan dalam bentuk tabel dan didukung oleh data yang akurat, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan tentang implementasi program Kartu Prakerja di kecamatan Ngaras.

I. Kerangka Teori



Gambar 1.1. Kerangka Teori

Di Indonesia masih banyak pemuda yang belum mempunyai skill atau kompetensi kerja, maka sudah sangat

tepat kebijakan pemerintah pusat meluncurkan Program Kartu Prakerja harus terus diterapkan sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dan mendorong kemandirian, maka pemerintah membuat suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi kerja dengan dikeluarkannya peraturan di atas. Berdasarkan kerangka teori di atas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana pelaksanaan program kartu prakerja dalam meningkatkan kompetensi kerja khususnya warga kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat.

Terdapat 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, ungkap Edward III yakni: (a) Transmisi: Masalah dalam penyaluran komunikasi salah satunya ialah miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan; (b) Kejelasan: Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan publik; dan (c) Konsistensi: Perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas untuk dipraktikkan. Jika perintah sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.

J. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini mengikuti struktur dan format yang telah ditetapkan sesuai dengan pedoman skripsi yang berlaku dari Universitas Islam Negeri Bandar Lampung. Disini penulis menggunakan penelitian kualitatif, adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini mencakup penegasan judul, konteks latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur yang relevan, metode penelitian, kerangka teori, dan tata cara penyusunan pembahasan. Bab ini memiliki peran sangat penting karena menjadi dasar yang mengarahkan

pembahasan dalam penelitian yang sedang dijalankan oleh peneliti.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan teori-teori yang menjadi dasar dalam menjalankan riset, serta menguraikan 8 program pemerintah sebagai bentuk perhatian kepada seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan memastikan pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan meningkatkan daya beli di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Delapan program tersebut meliputi: Program Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, Pembebasan Tarif Listrik 450 VA, Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai, Program Padat Karya Tunai, dan Program Keselamatan oleh Pori.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menggambarkan konteks sosial, sejarah, ekonomi, demografi, dan lingkungan dari objek penelitian. Informasi ini membentuk latar belakang yang mendukung temuan penelitian. Bab ini mendetailkan situasi lingkungan dalam konteks masalah yang telah diuraikan pada Bab I, yang kemudian diperdalam melalui landasan teori untuk memperkuat dan mengklarifikasi informasi tersebut.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian yang memberikan jawaban terhadap rumusan masalah dan fokus penelitian yang telah disajikan pada Bab I. Bab ini juga mempertimbangkan masalah yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teori yang telah diuraikan pada Bab II. Selain itu, bab ini melibatkan pengamatan terhadap keadaan lingkungan objek penelitian yang telah dijelaskan pada Bab III. Dari kombinasi data tersebut, ditemukan jawaban dan temuan mengenai permasalahan yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan secara ringkas menyajikan hasil temuan penelitian yang dianggap berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan ini berasal dari analisis dan interpretasi data yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

IMPLEMETASI, PROGRAM KARTU PRAKERJA, KOMPETENSI KERJA

A. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Bahasa Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Pada konteks yang hendak penulis jabarkan dalam penelitian ini implementasi merupakan sebuah proses ide, kebijakan, inovasi dalam sebuah tindakan aplikatif sehingga memberikan dampak nilai maupun sikap yang terealisasi. Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).²⁶

Menurut Van Meter dan Van Horn secara definitif implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.²⁷

Tahapan demi tahapan yang dimulai dari perencanaan, proses pelaksanaan sampai kepada evaluasi akan diteliti dan disajikan dalam penelitian yang peneliti laksanakan di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.

Pengertian pelaksanaan berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia adalah proses, cara, pembuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan dan sebagainya. Pelaksanaan adalah sebuah rencana yang sudah disusun matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usahayang

²⁶ Solichin Abdul wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 65.

²⁷ *Ibid*, 66.

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan diterapkan dan dilengkapi segera kebutuhan , alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategi maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Pengertian Implementasi menurut beberapa ahli :²⁸

- 1) Menurut Westra Implementasi adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan dimana tempatnya dan kapan waktunya dimulainya.
- 2) Menurut Bintoto Tjokroadmudjyo, pengertian Implementasi ialah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.
- 3) Siagian S.P mengemukakan bahwa pengertian Implementasi merupakan keseluruhan proses pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya mereka mau bekerja secara ikhlas agar tercapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis
- 4) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia merumuskan pengertian Implementasi adalah upaya agar tiap pegawai atau tiap organisasi berkeinginan dan berusaha mencapai tujuan yang direncanakan.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart berpendapat bahwa implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja

²⁸ Rahardjo Adisasmita, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Yogyakarta; Graha Ilmu, hlm.34.

bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Adapun pengertian implementasi kebijakan menurut Nugroho yakni terdapat dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplemmentasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivate atau turunan kebijakan itu sendiri. Oleh sebab itu, impelementasi kebijakan merupakan dua pilihan dimana yang pertama langsung mengimplemptasi dalam bentuk program dan pilihan kedua melalui formulasi kebijakan.

B. Konsep Implementasi Kebijakan

Kata implementasi dihubungkan dengan suatu kegiatan yang lakukan agar dddapat mencapai tujuan tertentu. Implementasi juga sering disebut sebagai suatu proses rangkaian suatu kegiatan akan ditindak lanjuti setelah sebuah rencana dan kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan.

Sebuah kebijakan berbeda dengan apa yang telah direncanakan. Hal itu disebabkan distorsi implementasi kebijakan yang merupakan isu penting bagi para impelementor untuk mengatasinya dengan harapan agar suatu desain kebijakan dapat diterapkan dengan sukses.²⁹

Pengertian implementasi kebijakan mengandung unsur-unsur: 1) proses, yaitu serangkaian aktivitas atau aksi nyata yang dilakukan untuk mewujudkan sasaran/tujuan yang telah ditetapkan, 2) tujuan yaitu sesuatu yang hendak dicapai melalui aktivitas yang dilaksanakan, dan 3) hasil dan dampak yaitu manfaat nyata yang dirasakan oleh kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn mendefenisikan implementasi kebijakan ialah suatu tindakan yang akan dilakukan baik oleh individu maupun dalam kelompok dan pejabat-pejabat pemerintah dan swasta yang ditujukan demi tercapainya tujuan-tujuan yang telah ditentukan oleh sebuah keputusan kebijaksanaan, mereka menekankan bahwa tahapan implementasi

²⁹ Schnider, Goggin, and Ingram, Malcolm L, *Implementation Theory and Practice, Toward a Third Generation*. USA: Scott, Foresman and Company. 2017. H.7

baru terjadi selama proses legitimasi dilalui dan pengalokasian sumber daya, dana yang telah disepakati tidak pada saat dimulai pada saat tujuan dan sasaran kebijakan publik ditetapkan, tetapi tahap implementasi.

Kebijakan mengisyaratkan keinginan untuk berbuat sesuai struktur implementasi. Suatu desain kebijakan yang berbeda dapat memengaruhi implementasi dalam skala lebih luas. Untuk menjalankan suatu kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yaitu dengan cara langsung melaksanakan dalam bentuk program kebijakan atau melalui langkah memformulasikan kebijakan turunan dari kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan publik dilaksanakan dalam dua wujud yaitu wujud program dan kebijakan publik tambahan.³⁰ Pada prinsipnya implementasi kebijakan publik dalam bentuk program diimplementasikan ke bawah dalam bentuk proyek, kegiatan dan pemanfaatan yang sesuai dengan tujuan pemerintah dan publik. Implementasi kebijakan publik biasanya diwujudkan dalam bentuk kebijakan undang-undang atau perda yaitu suatu jenis implementasi kebijakan yang perlu mendapatkan penjelasan atau yang biasa sering disebut sebagai peraturan pelaksana. Implementasi kebijakan tersebut secara operasional antara lain keputusan dan instruksi presiden, keputusan menteri, keputusan dinas, keputusan kepala daerah dan lainnya. Implementasi kebijakan ini pada dasarnya merupakan wujud program yang dijadikan proyek untuk berbagai kegiatan pelaksanaan.³¹

Implementasi kebijakan dari suatu organisasi sangat erat kaitannya dengan serangkaian implementasi yaitu misi, visi, strategi dan cara, kebijakan, program, proyek dan kegiatan yang menghasilkan umpan balik. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah suatu implementasi kebijakan yang diterakan dalam suatu organisasi mulai dari misi sampai pada pemanfaatan dari suatu proses yang memerlukan adanya umpan balik. Pada prinsipnya implementasi merupakan aktivitas yang berdasar pada

³⁰ Erwan Agus Purwanto and Dyah Ratih Sulis, "Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta," no. September (2012): 20.

³¹ Nugroho, Riant, Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2016.

rumusan kebijakan yang dilaksanakan untuk pencapaian tujuan kegiatan. lah untuk menegaskan sesuai dengan desain struktur proses implementasi.

Dalam inti permasalahan suatu implementasi kebijakan merupakan bagaimana suatu kebijakan itu dibuat dan apakah kebijakan dibuat sesuai dengan ketersediaan sumber daya. Untuk dapat mewujudkan langkah tersebut maka, diperlukan adanya implementasi kendali yang kemudian dievaluasi. Dalam melaksanakan suatu implementasi kebijakan, ada faktor-faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan untuk mengetahui kebijakan tersebut dapat berjalan dengan baik atau tidak. Menurut Edward III yang mengemukakan bahwa implementasi kebijakan akan menjadi efektif apabila ditentukan oleh sumber daya, struktur organisasi komunikasi, serta disposisi atau sikap.³² Tersedianya sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan, adanya struktur organisasi dalam melaksanakan kebijakan, Komunikasi berkaitan dengan kebijakan yang dihubungkan dengan komunikasi pada organisasi atau publik, sikap dan tanggap dari pihak yang terlibat dan sumberdaya berkenaan dengan ketersediaan sumber daya pendukung khususnya sumber daya manusia.

Keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat diukur dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan dan mengoperasionalkan program-program yang telah dirancang sebelumnya. Dengan munculnya implementasi kebijakan dalam bentuk nyata maka secara otomatis mendapatkan garansi dari terlaksananya program dengan baik. Kebijakan implementasi sama peliknya dengan kebijakan formulasi, maka perlu diperhatikan berbagai faktor yang akan mempengaruhinya.³³

Argumen Edward III bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 komponen, yakni: (1) Komunikasi; (2)

³² A. Rahmawati. Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone. Muhammadiyah Makassar. 2020. H. 10

³³ Mustari, Nuryanti, Implementasi Kebijakan Publik , Makassar Membumi Publishing. 2013. H. 5

Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi. Beberapa komponen tersebut sebagai suatu sistem yang harus diperhatikan yang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan (capaian tujuan) dalam mengimplementasikan suatu kebijakan.³⁴

Pertama, komunikasi. Komunikasi yang terjalin harus mampu menjembatani segala macam bentuk kepentingan, baik antar pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan dan masyarakat. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima dan dimengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan oleh seluruh pelaksana kebijakan. Terdapat 3 indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi, ungkap Edward III yakni: (a) Transmisi: Masalah dalam penyaluran komunikasi salah satunya ialah miskomunikasi yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan; (b) Kejelasan: Komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan publik; dan (c) Konsistensi: Perintah yang diberikan harus konsisten dan jelas untuk dipraktikkan. Jika perintah sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan.³⁵

Kedua, Sumber Daya. Pandangan Edward III bahwa sumber daya kebijakan merupakan salah satu komponen yang harus diperhatikan secara lebih, sebab dengan tidak adanya sumber daya maka kebijakan hanya akan menjadi konsep atau rencana yang tidak memiliki pengaruh apapun terlebih dalam memecahkan permasalahan di lapangan. Komponen sumber daya meliputi: (a) Jumlah staf dan keahlian dari pelaksana; (b) Informasi yang relevan; (c) Adanya kewenangan yang menjamin program; serta (d) Adanya fasilitas pendukung (dana, sarana dan prasarana).

Ketiga, Disposisi. Menurut Edward III, disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh. Jika

³⁴ Edward III, G. C. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional Quarterly, Inc. (1980). H. 29

³⁵ Agustino, L. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta. (2017). H.

implementor mempunyai kecenderungan positif terhadap implementasi kebijakan maka kemungkinan besar kebijakan akan terlaksana sesuai dengan keputusan yang telah dirumuskan. Begitupun sebaliknya, bila bersikap negatif -karena konflik kepentingan- maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang cukup serius. Adapun disposisi implementator dibedakan menjadi 3 hal, yaitu: (a) Respon implementator terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementator untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) Kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) Intensitas disposisi implementator, yakni preferensi nilai yang telah dimiliki tersebut.

Terakhir, Struktur Birokratik. Suatu kebijakan seringkali melibatkan beberapa instansi dalam proses implementasinya, sehingga diperlukan koordinasi yang efektif. Pemahaman struktur birokrasi dapat diartikan sebagai pola hubungan kewenangan dan koordinasi di antara agen pelaksana terkait dengan implementor kebijakan. Keberadaan birokrasi tidak hanya dalam struktur pemerintah, tetapi juga ada dalam organisasi-organisasi swasta, dan institusi lainnya. Menurut Edwards III terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni: (a) Standard Operational Procedure (SOP); dan (b) Fragmentasi.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Disisi lain keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumberdaya finansial. Selain itu, keberhasilan implementasi harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya SOP sebagai pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak.

Fungsi Implementasi adalah:

- a) Implementasi proses kepemimpinan, pembimbingan, dan pemberian motivasi kepada tenaga kerja agar dapat bekerja secara efektif dan efisiensi dalam pencapaian tujuan.

- b) Memberikan tugas dan penjelasan rutin mengenai pekerjaan.
- c) Menjelaskan kebijakan yang ditetapkan.
- d) Proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawab dengan penuh kesadaran dan produktifitas yang tinggi.

C. Program Kartu Pra-Kerja

Program Kartu Prakerja merupakan bagian dari Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sektor perlindungan sosial. Mulai dari pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan/atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program kartu prakerja sendiri dimulai pada awal masa pandemi didalam serangkaian inisiatif Pemerintah yang menopang masyarakat untuk tetap bertahan di masa pandemi, bahkan yang diharapkan dapat menekan laju angka pengangguran.

Program kartu prakerja memiliki tujuan untuk, mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dan mengembangkan kewirausahaan.³⁶

Menurut Perpres Nomor 76 tahun 2020, kartu prakerja adalah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program Kartu Prakerja. Menurut Menteri Ketenagakerjaan dilansir dari prakerja.go.id, kartu prakerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilan.

Jadi penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kartu prakerja merupakan suatu identitas yang diberikan kepada seorang yang telah resmi terdaftar sebagai calon peserta program kartu prakerja yang di buat oleh pemerintah. Guna untuk masyarakat yang ingin

³⁶ Pasal 2, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui program Kartu Prakerja.

meningkatkan keahliannya dengan mengikuti pelatihan yang telah disediakan oleh kementerian ketenagakerjaan.

1. Tujuan Kartu Pra Kerja

Program kartu prakerja bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja, serta mengembangkan kewirausahaan. Kartu Prakerja tidak hanya untuk mereka yang sedang mencari kerja, namun juga untuk pekerja/buruh yang terkena PHK dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pelaku usaha mikro dan kecil. Untuk merespon dampak dari Covid-19, Program kartu Prakerja untuk sementara waktu akan diprioritaskan bagi pekerja/buruh yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

2. Syarat Kartu Pra Kerja

Adapun syarat dalam mengikuti kartu prakerja yaitu :

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Berusia 18 tahun ke atas
- c) Tidak sedang mengikuti pendidikan formal
- d) Bukan Pejabat Negara Yaitu :
 1. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 2. Aparatur Sipil Negara
 3. prajurit Tentara Nasional Indonesia
 4. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 5. Kepala Desa dan Perangkat Desa
 6. Direksi, Komisaris dan Dewan Pengawas pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah

3. Solusi Proram Kartu Pra Kerja

- a) Membantu meringankan biaya pelatihan yang ditanggung pekerja dan perusahaan
- b) Mengurangi biaya untuk mencari informasi mengenai pelatihan
- c) Mendorong ke bekerjaan dengan mengurangi mismatch
- d) Menjadi komlemen dari pendidikan formal

- e) Membantu daya beli masyarakat yang berdampak penghidupannya akibat Covid.19

4. Tahapan Dalam mengikuti Kartu Pra Kerja

- a) Pendaftaran – masuk ke situ prakerja.go.id dan buat akun dengan data diri
- b) Seleksi – ikuti tes motivasi dan kemampuan dasar untuk bisa bergabung kegelombang pendaftaran dan tunggu pengumuman hasilnya. Pilih pelatihan – Pilih Pelatihan di mitra platform digital resmi dan bayar dengan kartu Pra Kerja.
- d) Ikuti pelatihan – Selesaikan pelatihan online dan dapatkan sertifikat elektronik.
- e) Beri ulasan dan rating – Berikan ulasan dan rating terhadap pelatihan
- f) Insentif pasca pelatihan – Dapat insentif Rp 600 ribu/bulan selama 4 bulan setelah menyelesaikan pelatihan.
- g) Insentif pasca survey kekerjaan – Isi 3 survey yang diberikan pasca pelatihan dan dapatkan insentif Rp 50 ribu untuk setiap surveynya.

D. Peningkatan Kompetensi Kerja

1. Peningkatan

Peningkatan adalah proses yang menciptakan pertumbuhan, kemajuan, perubahan positif atau penambahan komponen fisik, ekonomi, lingkungan, sosial dan demografis. Tujuan pengembangan adalah peningkatan tingkat dan kualitas hidup penduduk dan penciptaan atau perluasan pendapatan daerah setempat dan peluang kerja, tanpa merusak sumber daya lingkungan.

Peningkatan adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk meningkatkan suatu produk baru atau menyempurnakan

produk yang telah ada.³⁷ Dalam melaksanakan penelitian penelitian metode yang digunakan, yaitu metode kualitatif.³⁸

a) Jenis-Jenis Peningkatan

Jenis peningkatan dikelompokkan atas peningkatan secara informal dan peningkatan secara formal.

(1) Peningkatan secara informal yaitu seseorang atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya dengan mempelajari buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan pekerjaan atau jabatannya. Peningkatan secara informal menunjukkan bahwa seseorang tersebut berkeinginan keras untuk maju dengan cara meningkatkan kemampuan kerjanya. Hal ini bermanfaat bagi perusahaan karena prestasi kerja karyawan semakin besar, disamping efisiensi dan prosuktifitasnya juga semakin baik.

(2) Peningkatan secara formal yaitu seseorang atau masyarakat diberikan untuk mengikuti pendidikan atau latihan, baik yang dilakukan perusahaan maupun yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pendidikan atau pelatihan. Pengembangan secara formal dilakukan perusahaan karena tuntutan pekerjaan saat ini ataupun masa akan datang, yang sifatnya non karir atau peningkatan karier seseorang karyawan.

2. Kompetensi

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut.

Menurut Mc Clelland mendefinisikan kompetensi (*competency*) sebagai karakteristik yang mendasar yang

³⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008, hlm. 164.

³⁸ Endang Mulyaningsih, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, Yogyakarta: ALFABETA, 2011, hlm.167.

dimiliki seseorang yang berpengaruh langsung terhadap, atau dapat mendeskripsikan, kinerja yang sangat baik. Dengan kata lain, kompetensi adalah apa yang para outstanding performers lakukan lebih sering pada lebih banyak situasi dengan hasil yang lebih baik, daripada apa yang dilakukan para average performers.

Definisi Kompetensi menurut Depdikbud adalah karakteristik yang dimiliki oleh individu dan digunakan secara tepat dengan cara yang konsisten untuk mencapai kinerja yang diinginkan.

Kompetensi dimaknai pula sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir, dan bertindak. Kompetensi dapat pula dimaksudkan sebagai kemampuan melaksanakan tugas yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau latihan.³⁹ Menurut UU no. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan: pasal 1(10), “Kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

Kompetensi merupakan pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara konsisten dan terus menerus yang memungkinkan seseorang menjadi kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap dasar untuk melakukan sesuatu, kebiasaan berfikir dan bertindak itu didasari oleh budi pekerti luhur baik dalam kehidupan pribadi, sosial kemasyarakatan, keberagaman, dan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Kompetensi di bagi menjadi 2 kategori yaitu :

- a. Kompetensi inti atau Dasar, yaitu kompetensi minimal yang mutlak dimiliki oleh pelaku profesi;
- b. Kompetensi Tambahan atau lanjutan yaitu pengembangan dari pengetahuan dan keterampilan dasar untuk

³⁹ Chandra Herry, *Pintar di Faktor-faktor Strategi Positioning Dalam Pemasaran Real estat*, Surabaya: Graha Ilmu 1998, hlm. 76.

mendukung tuntutan/ kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis serta perkembangan IPTEK.

a. Karakteristik Kompetensi

Menurut Spencer dan Spencer dalam kompetensi terbentuk dari lima karakteristik, yaitu :

1) Motif

Sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan orang yang menyebabkan tindakan. Motif mendorong, mengarahkan, dan memilih perilaku menuju tindakan atau tujuan tertentu.

2) Sifat

Karakteristik fisik dan respons yang konsisten terhadap situasi atau informasi. Kecepatan reaksi dan ketajaman mata merupakan ciri fisik kompetensi seorang pilot tempur.

3) Konsep Diri

Sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan keyakinan orang bahwa mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah bagian dari konsep diri orang.

4) Pengetahuan

Informasi yang dimiliki orang dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks. Skor pada tes pengetahuan sering gagal memprediksi prestasi kerja karena gagal mengukur pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sebenarnya dipergunakan dalam pekerjaan.

5) Keterampilan

Kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental tertentu. Kompetensi mental atau keterampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan konseptual.

b. Indikator Kompetensi

Pada dasarnya banyak indikator yang mempengaruhi kompetensi karyawan suatu perusahaan, indikator kompetensi yaitu:⁴⁰

1) Karakter pribadi (*traits*)

Karakter pribadi adalah karakteristik fisik dan reaksi atau respon yang dilakukan secara konsisten terhadap suatu situasi atau informasi.

2) Konsep diri (*self concept*)

Konsep diri adalah perangkat sikap, sistem nilai atau citra diri yang dimiliki seseorang.

3) Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki seseorang terhadap suatu area spesifik tertentu.

4) Keterampilan (*skill*)

Keterampilan adalah kemampuan untuk mengerjakan serangkaian tugas fisik atau mental tertentu.

5) Motivasi kerja (*motives*)

Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki oleh seseorang, yang selanjutnya akan mengarahkan, membimbing, dan memilih suatu perilaku tertentu terhadap sejumlah aksi atau tujuan.

1. Kerja

Keberhasilan atau pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh faktor produksi. Faktor produksi sering didefinisikan sebagai setiap hal yang diperlukan secara teknis untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Faktor-faktor produksi tersebut diantaranya yaitu bahan pokok perlatan gedung, tenaga kerja, mesin dan modal yang secara garis besar dapat ditegorikan menjadi input manusia dan non manusia.⁴¹

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja

⁴⁰Fadilah, *Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Bank Kalsel Cabang Pembantu Di Banjar Masin, Jurnal Bisnis dan Pembangunan, Volume 6, No. 1, Edisi Januari-Juni 2017.*

⁴¹ N. Gregory Mankiw, Makroekonomi, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 213.

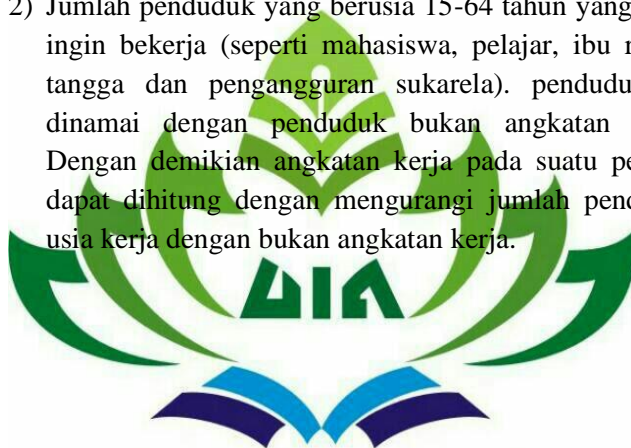
yang terdapat dalam pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁴²

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kerja adalah setiap penduduk yang mampu menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan batas usia minimal angkatan kerja yaitu 15 tahun.

a. Klasifikasi Kerja

Untuk menentukan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja diperlukan informasi, yaitu :

- 1) Jumlah penduduk yang berusia diantara 15 tahun dan 64 tahun yang data disebut dengan penduduk usia kerja.
- 2) Jumlah penduduk yang berusia 15-64 tahun yang tidak ingin bekerja (seperti mahasiswa, pelajar, ibu rumah tangga dan pengangguran sukarela). penduduk ini dinamai dengan penduduk bukan angkatan kerja. Dengan demikian angkatan kerja pada suatu periode dapat dihitung dengan mengurangi jumlah penduduk usia kerja dengan bukan angkatan kerja.



⁴² Manulang, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.3.



BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek

1. Profil Kantor Kecamatan Ngaras

Objek penelitian adalah di Kantor Kecamatan Ngaras yang berlokasi di Jalan Ngaras, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Sebelum tanggal 21 Juli 2017 bernama Kecamatan Bengkunt Belimbing, lalu berubah menjadi Kecamatan Bengkunt dan tepat pada tanggal 21 Juli 2017 resmidurybah dan ditetapkan menjadi Kecamatan Ngaras, hal ini sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 04 Tahun 2017 Tentang Perubahan nama Kecamatan Bengkunt Belimbing menjadi Kecamatan Bengkunt dan Kecamatan Bengkunt menjadi Kecamatan Ngaras.

2. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Ngaras

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, Lampung.



Saat ini yang menjadi Camat pada kantor kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat adalah Bapak Andi Indrawara, S.Sos. di Kecamatan Ngaras sendiri terdapat 9 Desa yakni Pekon Parada Suka, Pekon Negeri Ratu Ngaras, Pekon Bandar Jaya, Pekon Kota Batu, Pekon Mulang Maya, Pekon Raja Basa, Pekon Padang Dalam, Pekon Suka Maju, dan Pekon Sukarame. Dengan total jumlah penduduk dari 9 Pekon tersebut adalah 9,553, jumlah KK 2,217, luas wilayah mencapai 79,97 KM² dan mayoritas penduduk di Kecamatan Ngaras beragama Islam.

Untuk tingkat pendidikan adalah sebagai berikut :

- a. Tidak/belum sekolah : 2,739 orang
- b. Belum tamat SD : 1,064
- c. Tamat SD : 3,139
- d. SLTP : 1,311
- e. SLTA : 1,099
- f. D₁ dan D₂ : 28
- g. S1 : 128
- h. S2 : 5
- i. S3 : 1

Status Pekerjaan di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat :

- a. Belum / tidak bekerja : 3,123
- b. Aparatur Pejabat Negara : 70
- c. Tenaga Pengajar : 21
- d. Wiraswasta : 748
- e. Pertanian dan Peternakan : 2,784
- f. Nelayan : 51
- g. Pelajar dan Mahasiswa : 1,400
- h. Tenaga Kesehatan : 11
- i. Pensiunan : 5
- j. Pekerjaan lainnya : 1,337.

B. Penyajian Fakta dan Data Penelitian

Dalam bab ini penulis membahas serta menyajikan deskripsi data berupa mekanisme yang ada pada program prakerja pada umumnya.

1. Mekanisme Program Kartu Prakerja Di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat

Pemerintah telah melaksanakan Program Kartu Pra Kerja sesuai dengan PERPRES NO. 76 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja. Masyarakat yang ingin mendaftarkan dan mendapatkan kartu Pra Kerja harus mempersiapkan berkas-berkas, syarat pendaftaran Kartu Pra-Kerja, menyediakan Handphone, akun email serta mengaktifkan uang elektronik Peserta yang ikut mendaftar dalam melaksanakan program kartu pra kerja tersebut memiliki kendala dalam melaksanakan.

Untuk peserta yang mendaftar memiliki kendala yang dialami yaitu, tidak kondusif pada saat pendaftaran, karena banyaknya pengunjung yang membuka halaman web sehingga menjadi eror dan juga lambat, dan itu jadi penentu oleh peserta yang mendaftar terhadap kelulusan Program Kartu Pra Kerja dan sebagian masyarakat ada yang tidak bisa menggunakan handphone android. dan ada juga penundaan jadwal insentif, sinyal dan kelas Pra Kerja harus sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki.

Solusi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan atau kendala tersebut yaitu dengan tetap memperbaiki sistem website dan menghubungi customer service jika mengalami penundaan insentif, mencari kembali kelas sesuai dengan minat dan bakat. Partisipasi masyarakat terhadap Program kartu Pra kerja sangat antusias. Selain membantu perekonomian, juga meningkatkan skill.

Ada dua pengertian untuk istilah “program”. Program dapat diartikan dalam arti khusus dan program dalam arti umum. Pengertian secara umum program adalah sebuah

bentuk rencana yang akan dilakukan “Program” apabila dikaitkan langsung dengan evaluasi program, maka program diartikan sebagai unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau implementasi dari kebijakan, berlangsung dalam proses yang berkesinambungan dan terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa mekanisme dan pelaksanaan untuk mendapatkan dan terdaftar program pra kerja belum bisa dikatakan baik dan sempurna. Masih banyak peserta yang binggung pada saat mengikuti Program Kartu Pra Kerja, belum bisa merasakan pelayanan sistem yang baik dan masih banyak masyarakat yang belum tertarik untuk mengikuti Program Kartu Pra Kerja.

Program Kartu Prakerja 2023 gelombang 48 telah dibuka. Terdapat 7 tahap yang harus dilalui calon peserta untuk bisa mendapatkan nilai manfaat Kartu Prakerja dengan total Rp 4,2 juta. Kartu Prakerja adalah program pengembangan skill atau kompetensi kerja yang ditujukan bagi para pencari kerja, pekerja atau buruh yang terdampak pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja yang membutuhkan kesempatan untuk meningkatkan kompetensi.

Pada tahun ini, pemerintah melalui Kemenko Perekonomian melakukan penyesuaian pada skema Kartu Prakerja. Adapun skema Kartu Prakerja gelombang 48 kali ini bukan lagi semi bansos melainkan skema normal. Pada skema normal ini, besaran nilai manfaat yang bakal diterima peserta adalah senilai Rp 4,2 juta dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan Rp600 ribu yang akan diberikan sebanyak 1 kali, serta insentif survei sebesar Rp100 ribu untuk dua kali pengisian survei.

Untuk mendapatkan nilai manfaat Kartu Prakerja tersebut, terdapat 7 tahapan yang akan dilewati oleh calon peserta.

a. Pendaftaran

Pada tahap pendaftar, calon peserta dapat mendaftar dengan menginput data pribadi seperti, email, NIK, nomor KK, dan nomor HP yang masih aktif pada dashboard Kartu Prakerja

b. Seleksi

Calon peserta harus mengikuti tes motivasi & kemampuan dasar untuk bisa mengikuti seleksi gelombang dan tunggu pengumuman hasilnya.

c. Pilih Pelatihan

Selanjutnya, calon peserta bisa memilih pelatihan yang akan diikuti di Mitra Platform Digital dan bayar dengan Kartu Prakerja

d. Ikuti Pelatihan

Selesaikan pelatihan dan dapatkan sertifikat.

e. Beri Rating dan Ulasan

Berikan rating dan ulasan terhadap pelatihan yang telah diikuti.

f. Insentif Biaya Mencari Kerja

Sambungkan rekening atau e-wallet di salah satu Mitra Pembayaran untuk mendapat insentif Rp600rb per bulan setelah menyelesaikan pelatihan.

g. Insentif Pengisian Survei Evaluasi

Isi survei yang diberikan dan dapatkan insentif Rp50 ribu untuk setiap survei.

Buat akun Kartu Prakerja:

1. Masuk ke laman www.prakerja.go.id dan klik menu daftar sekarang
2. Masukkan alamat email dan kata sandi. Gunakan email aktif.
3. Program Kartu Prakerja akan mengirim pemberitahuan melalui email. Buka email dan lakukan verifikasi akun Pendaftaran berhasil.

Mendaftar gelombang Kartu Prakerja:

1. Buka www.prakerja.go.id
2. Siapkan nomor Kartu Keluarga serta NIK
3. Masukkan data diri dan ikuti petunjuk pada layar
4. Siapkan kertas dan alat tulis untuk mengikuti Tes Motivasi dan Kemampuan Dasar secara online
5. Klik "Gabung" pada Gelombang yang sedang dibuka
6. Nantikan pengumuman peserta yang lolos seleksi melalui dashboard Kartu Prakerja.

Berikut ini syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendaftar Kartu Prakerja:

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas PERPRES No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Progam Kartu Prakerja Pasal 3 ayat (4) dan ayat (5) adalah sebagai berikut :

1. WNI berusia 18 tahun ke atas.
2. Tidak sedang menempuh pendidikan formal.
3. Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil.
4. Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa dan perangkat desa dan Direksi/Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD.
5. Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja.

Untuk penerima Kartu Prakerja di Kecamatan Ngaras yang baru mempunyai akun, ketika gelombang dibuka nantinya hanya tinggal klik gabung untuk mengikuti seleksi. Untuk mengantisipasi segala bentuk kecurigaan, calon pendaftar

program diminta untuk berhati-hati terhadap situs palsu jika ingin membuat akun Kartu Prakerja.

Seperti yang telah diketahui, program Kartu Prakerja selain memberikan pembekalan kepada calon pencari kerja, program tersebut juga telah membantu masyarakat dalam meningkatkan skill atau kompetensi. Nantinya peserta yang lolos program Kartu Prakerja bisa mengikuti pelatihan kerja sesuai dengan minat dengan memanfaatkan insentif saldo pelatihan kerja sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah). Kemudian tiap peserta yang lolos Kartu Prakerja juga akan mendapatkan insentif yang bisa diuangkan sebesar Rp 2,55 juta. Secara rinci insentif program Kartu Prakerja terdiri dari saldo pelatihan sebesar 1 juta, insentif pokok sebesar 2,4 juta dan insentif tambahan sebesar 150 ribu.

Mulai tahun 2023 program Kartu Prakerja hanya akan fokus pada peningkatan kompetensi angkatan kerja. Program Kartu Prakerja tidak lagi menjadi program semi bansos, penerima bantuan pemerintah seperti program keluarga harapan (PKH), bantuan produktif usaha mikro (BPUM), bantuan subsidi upah (BSU), dan lainnya.

Kartu Prakerja gelombang 48 sudah dibuka mulai Jumat 17 Februari 2023, Sedangkan Kartu Prakerja Gelombang 49 sudah dibuka hari Senin tanggal 6 Maret 2023. Ada sejumlah keuntungan yang didapat pemegang Kartu Prakerja ditahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya, penerima Kartu Prakerja akan menerima manfaat Rp 4,2 juta. Kenaikan cukup besar terjadi pada biaya pelatihan senilai Rp 3,5 juta sementara insentif paska pelatihan Rp 600 ribu yang diberikan 1x, dan insentif survey Rp 100 ribu untuk 2x pengisian.

Alasan bantuan pelatihan yang lebih besar pada program Prakerja ditahun 2023 adalah kegiatan dan ekonomi sudah mulai bangkit, oleh karena itu program Kartu Prakerja dikembalikan ketujuan utamanya yakni peningkatan kompetensi angkatan kerja. Dengan fokus pada peningkatan kompetensi maka porsi bantuan pelatihan menjadi besar. Bantuan biaya pelatihan Kartu Prakerja diberikan secara nontuni untuk biaya pelatihan. Bantuan

atau manfaat Kartu Prakerja diberikan hanya sekali karena Kartu Prakerja hanya dapat diikuti sekali seumur hidup. Cara mengecek besarnya saldo pelatihan Kartu Prakerja yang diberikan dapat dicek pada saldo bantuan pelatihan pada dashboard akun anda secara berkala, dan saldo pelatihan tidak dapat dipindah tangankan orang lain.

Setelah menerima pengumuman menjadi penerima Kartu Prakerja, anda punya waktu 15 hari kalender untuk membeli pelatihan pertama. Jika anda sudah menyelesaikan pelatihan pertama dan mengisi rating ulasan pelatihan pertama, anda dapat menggunakan sisa saldo bantuan pelatihan untuk membeli pelatihan berikutnya dalam kurun waktu 15 hari kalender. Lewat Dri batas waktu tersebut dan anda belum membeli pelatihan berikutnya maka sisa saldo pelatihan anda akan dikembalikan kerekening Negara. Dan sisa saldo anda tidak dapat diuangkan, oleh karena itu beli pelatihan sebanyak-banyaknya untuk memaksimalkan saldo bantuan pelatihan.

Memejemen pelaksana tidak dapat menambah saldo yang telah disetujui, namun memejemen pelaksana berhak membatalkan saldo secara sementara atau permanen jika ada indikasi kecurangan atau ada terbukti ada pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku atau syarat ketentuan Kartu Prakerja.

Progam Kartu Prakerja Tahun 2023 dengan skema normal, dimana bantuan pelatian terfokus pada pengembangan kompetensi angkatan kerja, penngkatan produktifitas, dan daya saing angkata kerja serta pengembangan kewirausahaan.

Pelaksanaan skema normal diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 yang aturan pelaksanaannya tertera pada Permenko Perekonomian Nomor 17 Tahun 2022. bahwa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu

Prakerja telah meningkatkan dan mengembangkan tata kelola dan pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

C. Analisis Data

Berikut analisis data yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara.

Bagi peserta program prakerja tak terlepas dari kendala saat mendaftar ataupun saat mengikuti pelatihan prakerja. Tentunya hal ini disebabkan oleh beberapa hal. Seperti data yang diperoleh melalui hasil wawancara bersama salah satu peserta program prakerja di kecamatan Ngaras.

“Kendala dalam pendaftaran Kartu Prakerja secara online, masih banyaknya calon penerima Kartu Prakerja yang belum mengerti tentang tata cara pendaftaran secara online, masih banyaknya calon penerima Kartu Prakerja yang tidak begitu faham dengan hp android juga signal yang lemot karena banyaknya orang yang mengakses juga menjadi kendala.”

Masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas teknologi, menjadi salah satu penyebab kendala atau masalah saat melakukan registrasi ataupun mengikuti pelatihan yang berbasis online. Dalam hal ini, pemerintah mengambil peran penting dalam membantu masyarakat, untuk memberikan sosialisasi kepada calon peserta prakerja untuk memberikan bimbingan teknologi secara tepat dan fasilitas pendukung seperti jaringan internet.

“Solusinya adalah para pegawai Kecamatan Ngaras membantu para calon penerima Kartu Prakerja dalam mendaftar Kartu Prakerja secara online tersebut, juga calon penerima Kartu Prakerja dapat menggunakan wifi yang ada pada kantor Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat tersebut.”

Selain kendala yang dialami masyarakat, terdapat pula antusias masyarakat dalam mendaftarkan diri sebagai peserta prakerja. Tentunya, masyarakat menyambut dengan gembira

bantuan dari pemerintah berupa biaya pelatihan serta insentif yang diberikan kepada masyarakat di era pandemic dengan tujuan membantu perekonomian masyarakat.

“Adanya progam Kartu Prakerja ini sangat disambut gembira oleh seluruh masyarakat di Kecamatan Ngaras ini, mereka sangat berharap bisa semuanya mendapatkan Kartu Prakerja tersebut. Walaupun ini belum semua mengetahui tapi sebagian warga sudah tau info dari mulut ke mulut.”

Adapun kekurangan dan kelebihan yang diperoleh melalui hasil wawancara yakni:

“Kelebihan dari pelaksanaan progam Kartu Prakerja di Ngaras adalah dapat meningkatkan Kompetensi Masyarakat penerima Kartu Prakerja. Sedang kekurangannya adalah dalam pelaksanaannya masih belum berjalan maksimal terlihat dari jumlah total penerima Kartu Prakerja yang masih sedikit dan yang mendapat pelatihan masih sangat sedikit dari total jumlah penerima Kartu Prakerja di Kecamatan Ngaras.”

Dengan tujuan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam perekonomian bagi peserta yang lolos program prakerja menjadi kelebihan tersendiri dari program yang dibentuk oleh pemerintah. Adapun belum maksimalnya program ini saat dijalankan menjadi landasan, agar pemerintah dapat mengevaluasi dan mengupdate program ini menjadi lebih baik lagi.

Program prakerja yang dijalankan saat pandemi covid-19, tentunya memiliki pengawasan dalam pelaksanaannya. Sama halnya seperti yang ada di kecamatan Ngaras. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis, diperoleh data sebagai berikut:

“pengawasan yang di berikan kepada pemerintah (Dinas Ketenagakerjaan) ada tetapi tidak turun langsung seperti

pengawasan pelatihan yang dilakukan, akan tetapi lebih baiknya pengawasan secara langsung sangatlah perlu karena banyak uang yang diturunkan kalau bisa melibatkan pihak-pihak yang berwajib, untuk pelanggaran satau sanksi. Beliau mengatakan kurang mengerti dengan sanksi tersebut yang seperti apa karena bagi yang tidak ikut pelatihan apakah namanya dicoret apa tidak. Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kecamatan Ngaras dengan sebagian besar metode digital/ elektronik, karena hal tersebut dianggap efektif dan efisien terutama Dalam era Revolusi 4.0 saat ini. Pihak Dinas Ketenagakerjaan melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat Kecamatan Ngaras dan menyebarkan Informasi melalui pembuatan Flayer dan Kartu Pra Kerja. Selain itu Dinas Ketenagakerjaan juga mengirimkan kontak person kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung Dalam rangka media informasi bagi warga Kecamatan Ngaras menyebarluaskan informasi melalu media sosial seperti facebook, Instagram.”

Pengawasan Perlu dilakukan karena, agar masyarakat mengetahui apa yang harus dilakukan sebelum, pada saat dan setelah mendaftar Program Kartu Pra Kerja dan bagaimana cara menggunakan insentif yang diberikan. Dengan Adanya pengawasan ini. Di harapkan Program Kartu Pra Kerja bukan hanya sebagai program yang sekedar dijalankan. Tapi juga sebagai ruang gerak bagi masyarakatnya yang mau meningkatkan keterampilan dan modal usaha. Tetapi ada masyarakat yang mengatakan bahwa pengawasan tidak ada dari Dinas Ketenagakerjaan secara langsung. Di karenakan sistem nya online tetapi masyarakat mengatakan bahwa perlu nya pengawasan dan transparansi dana pelatihan yang sudah di tetapkan senilai 1 juta rupiah sebagai dana non tunai. Dan ada beberapa sanksi yang di berikan kepada peserta yang melanggar sistem Program Pra Kerja Sanksi tersebut telah diatur di Dalam pasal 31 PERPRES yang

baru, dimana disebutkan penerima Kartu Pra Kerja yang tidak memenuhi ketentuan Dalam pasal 3 dan telah menerima bantuan biaya pelatihan wajib mengambil pelatihan atau insentif tersebut pada negara. Peserta diberi waktu 60 hari, jika tidak Akan dilakukan gugatan ganti rugi.



BAB IV

IMPLEMENTASI PROGRAM KARTU PRAKERJA DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI KERJA DI KECAMATAN NGARAS

A. Proses Implementasi Kebijakan Kartu Prakerja dalam Peningkatan Kompetensi di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir berdasarkan Teori Edward III

Implementasi yang pada hakikatnya merupakan tindakan ataupun sebuah pelaksanaan dari rencana yang sudah dipersiapkan dengan matang, rinci, cermat dan sudah disusun jauh hari sebelumnya, sehingga terdapat kejelasan dari rencana tersebut. Implementasi juga sebagai sarana penyedia dalam melaksanakan sesuatu yang nantinya akan menimbulkan dampak terhadap rencana yang telah dibuat dan mengacu pada aturan-aturan.⁴³ Namun, perlu juga untuk diketahui dengan baik, bagaimana implementasi itu berjalan dengan baik.

Sama halnya seperti implementasi program prakerja yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi kerja masyarakat yang ada di kecamatan Ngaras. Terdapat peraturan sebagai tolak ukur, apakah masyarakat layak untuk mendapatkan pelatihan atau sebaliknya. Adapun peraturan yang tidak dilaksanakan dengan baik, akan merugikan pihak-pihak yang bersangkutan itu sendiri.

George. C Edward III mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan adalah aktivitas yang kompleks dengan banyak factor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Studi kasus mengenai implementasi kebijakan adalah krusial untuk administrasi public dan juga kebijakan public. Sehingga implementasi kebijakan ini terdapat tahap pembuatan kebijakan

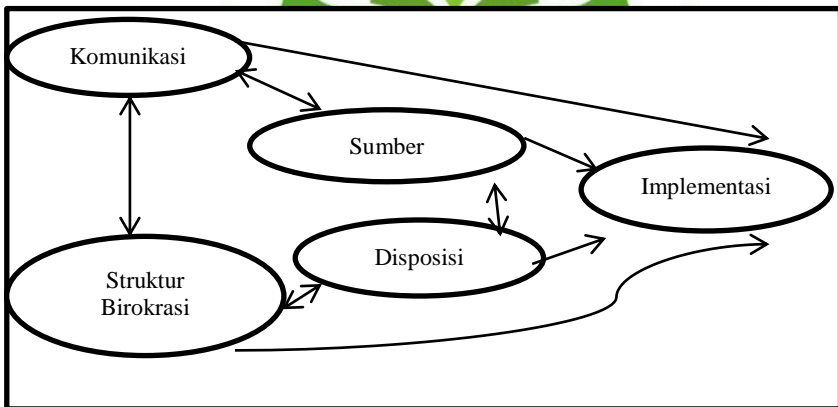
⁴³ Dianah Rofifah, "Implementasi Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Iqro," *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 12–26.

antara pembentuk kebijakan dan juga konsekuensi kebijakan untuk masyarakat yang dipengaruhi.⁴⁴

Dalam hal ini, terdapat empat faktor yang mencakup model teoritik mengenai implementasi kebijakan yang digunakan oleh Edwards III, dimana disetiap faktornya memiliki keterkaitan erat antara satu dan lainnya. Keempat faktor tersebut adalah komunikasi, sumber daya manusia, disposisi, dan juga struktur birokrasi. Meskipun demikian, diantara empat factor tersebut yang dianggap lebih penting yakni faktor komunikasi dan juga sumber daya manusia. Walaupun demikian, secara teoritik pada setiap faktor diasumsikan mempunyai peranan yang sama-sama penting untuk keseluruhan proses pada implementasi kebijakan publik.

Interaksi antara faktor-faktor tersebut dapat diilustrasikan seperti pada gambar bagan dibawah ini:⁴⁵

Empat faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan publik George. C Edward III



Gambar 4.1 Empat faktor kebijakan implementasi kebijakan publik

⁴⁴ MS. Jumroh, "Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik," 2021, h. 102

⁴⁵ Dwi Nurani, "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional (BOS) Di SDN Jakarta Selatan," 2009.

Dalam mengukur sebuah implementasi maka diperlukan indikator, berikut indikator menurut George. C. Edward III:⁴⁶

1. Komunikasi

Komunikasi merupakan tolak ukur seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan secara jelas dan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara konsisten dengan masyarakat yang melaksanakan peraturan tersebut. Terdapat tiga sub-indikator pada komunikasi dalam menjalankan implementasi kebijakan, yaitu: transmisi, konsistensi, dan juga kejelasan.

2. Sumber Daya

Tolak ukur sumberdaya pada implementasi kebijakan itu sendiri yaitu kecukupan dan kualifikasi, kewenangan, informasi, dan juga sarana dan prasarana yang nantinya akan mendukung implementasi itu sendiri.

3. Disposisi

Disposisi merupakan salah satu tolak ukur pada sikap pelaksana yang mendukung pelaksanaan kebijakan yang sudah ditetapkan. Sikap bagi pelaksana kebijakan merupakan faktor yang memiliki konsekuensi dalam implementasi kebijakan.

4. Struktur Birokrasi

Birokrasi baik secara sadar maupun tidak sadar dapat memilih bentuk-bentuk organisasi dalam membentuk kesepakatan kolektif dalam rangka pemecah masalah. Dalam hal ini, yang menjadi karakteristik pada struktur birokrasi yaitu SOP (*standar operating procedur*) dan fragmentasi.

Penilaian terhadap implemementasi program kartu prakerja masyarakat di kecamatan Ngaras merupakan salah satu langkah untuk meningkatkan kompetensi pekerjaan masyarakat, meningkatkan keahlian, dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu

⁴⁶ Nurani. Analisis Impelementasi Program Bantuan Operasional (BOS) di SDN Jakarta Selatan, 2009. H. 6.

sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, di kecamatan Ngaras sudah banyak masyarakat yang mendaftar program prakerja yang bertujuan untuk mengikuti pelatihan dan mendapatkan modal dari intensif yang akan diberikan oleh pemerintah.

“Beberapa masyarakat di kecamatan Ngaras telah lolos program kartu prakerja, dari hasilnya masyarakat menerima intensif selama 4 bulan berturut-turut. Masyarakat banyak yang menggunakannya untuk modal usaha dan persiapan melamar kerja. Sebagian digunakan untuk mengikuti pelatihan secara offline. Intinya perekonomian dimasa pandemi ini lebih meningkat jika masyarakat menerima program prakerja.”⁴⁷

Kemudian ditambahkan juga: “Di Ngaras untuk keseluruhan setau saya yang sudah mendapatkan kartu prakerja sebanyak 150 orang dari total keseluruhan 9 Pekon yang terdapat di Ngaras. Alhamdulillah saya sangat senang sekali karna ini betul-betul bisa buat nyambung hidup. Setelah berhasil terdaftar saya menunggu dan beberapa minggu kedepan sy mendapat pelatihan bengkel motor selama 2 bulan dan alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu dari pelatihan tersebut dan saya beranikan diri untuk buka bengkel motor sendiri dan sampai sekarang saya sudah bisa menopang untuk perekonomian rumah tangga saya.”⁴⁸

Dari pernyataan yang diperoleh melalui wawancara dengan informan, disampaikan bahwa terdapat masyarakat yang telah

⁴⁷ Budi Irawan. “Ketua Karang Taruna”, *Wawancara Kamis 9 Maret 2023*. pukul 09.00-10.00

⁴⁸ Suyatman. “Masyarakat Penerima Program Prakerja, *Wawancara Sabtu 11 Maret 2023*. Pukul 09.30-10.00.

mendaftarkan program kartu prakerja sampai tahap akhir hingga mengikuti pelatihan dan menerima intensif. Intensif yang diperoleh tersebut digunakan sebagai modal usaha atau modal untuk mengasah kemampuan yang nantinya masyarakat dapat melamar pekerjaan.

Pada dasarnya, pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan untuk mencapai sebuah tujuan yang sudah ditetapkan oleh kebijakan pemerintah. Dalam setiap kebijakan atau program haruslah dilaksanakan serta dijaga supaya tidak terjadi ketidaklancaran dalam penerapan program atau kebijakan tersebut. Dan pada kebijakan yang sudah diterima dan disahkan tidaklah memiliki arti jika tidak dilaksanakan. Maka dari itu, pelaksanaan kebijakan harus berhasil. Bahkan tidak hanya pelaksanaannya yang harus berhasil, tetapi juga mencapai tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut harus juga tercapai. Sama halnya dengan program prakerja yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, yang memiliki tujuan baik bagi masyarakat di era pandemi.

Dalam melaksanakan kebijakan, hal ini akan dikatakan tidak berhasil jika:

1. Dasar kebijakan atau yang disebut dengan teori tidak tepat, sehingga harus adanya reformulasi pada kebijakan yang sudah ada.
2. Tidak efektifnya sarana yang dipilih untuk pelaksanaan.
3. Tidak menggunakan sarana sebagaimana mestinya.
4. Pada isi kebijakan yang ada kurang jelas atau samar-samar.
5. Ketidakpastian factor intern dan ekstern.
6. Kebijakan yang sudah ditetapkan mengandung banyak lubang.
7. Kurang memperhatikan teknis dalam pelaksanaan.
8. Kurangnya sumber-sumber lain seperti waktu, materi, dan SDM.⁴⁹

⁴⁹ Nuryanti Mustari, "Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi,Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)," *Kebijakan Publik Deliberatif* 1 (2015): 286.

Di dalam penelitian ini ditemukan data yang di peroleh melalui hasil wawancara bersama salah satu penerima program prakerja “usia saya baru saja 17 tahun, jika sesuai dengan peraturan yang berlaku saya tidak bisa mengikuti program prakerja tersebut, tetapi fakta di lapangan saya lolos pendaftaran program prakerja dan akhirnya saya dapat mengikuti pelatihan sampai mendapatkan intensif.”

Dilihat dari fakta yang diatas, hal tersebut menyebabkan kegagalan dalam menjalankan kebijakan. Hal tersebut dilihat dari tidak seimbangannya antara SOP yang dibentuk dengan fakta yang ada di lapangan. Hal tersebut tentunya bisa dipahami bahwa kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan tidaklah selalu disebabkan oleh pelaksanaan administrasi, melainkan kurang sempurnanya dalam pembentukan kebijakan yang ada. Dalam hal ini, tentunya peranan sangat penting berada di tangan pelaksana kebijakan yang harus mampu mengambil langkah-langkah untuk mengadakan pembaruan terhadap kebijakan itu sendiri.

Syarat dan prosedur untuk ikut program kartu prakerja di Kecamatan Ngaras

Dalam implementasi program prakerja yang ada di kecamatan Ngaras, tentunya memiliki prosedur dan juga syarat sebagai langkah awal dalam menjalankan kebijakan yang disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Program Kartu Prakerja yang telah dijelaskan dalam Peraturan Presiden (PERPRES) No. 36 tahun 2020 adalah program pengembangan kompetensi kerja yang nantinya ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.

Kartu prakerja ialah kartu penanda atau identitas yang diberikan kepada penerima manfaat program kartu prakerja.⁵⁰

Terdapat syarat dan prosedur dalam mengikuti program kartu prakerja yang secara umum dilengkapi dan dijalankan sesuai prosedur yang berlaku yaitu:

a. Syarat Pendaftaran

Secara umum terdapat syarat yang harus dipenuhi saat mendaftar kartu prakerja, syarat ini berlaku secara universal atau berlaku untuk semua masyarakat di Indonesia tidak terkecuali di Kecamatan Ngaras. Adapun syaratnya sebagai berikut:

- 1) WNI berusia 18 tahun ke atas
- 2) Tidak sedang menempuh pendidikan formal
- 3) Sedang mencari kerja, pekerja/buruh yang terkena PHK, atau pekerja/ buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, seperti pekerja/ buruh yang dirumahkan dan pekerja bukan penerima upah, termasuk pelaku usaha mikro & kecil
- 4) Bukan penerima bantuan sosial lainnya selama pandemi COVID-19
- 5) Bukan Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, ASN, Prajurit TNI, Anggota Polri, Kepala Desa, perangkat desa dan Direksi/ Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN atau BUMD Maksimal 2 NIK dalam 1 KK yang menjadi Penerima Kartu Prakerja⁵¹

Dari beberapa persyaratan di atas harus dipenuhi oleh masyarakat yang ingin mendaftar program kartu prakerja di kecamatan Ngaras, jika persyaratan tersebut tidak dipenuhi maka

⁵⁰ Presiden Republik Indonesia, “Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja,” no. 039037 (2020): 39037–48, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140611/perpres-no-76-tahun-2020>.

⁵¹ Seksi Informasi Hukum and Ditama Binbangkum, “Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 Segera Dibuka, Ini Syaratnya,” 2023, 5–7.

dapat dipastikan bahwa mereka akan ditolak. Namun, dalam beberapa kasus di lapangan yang ada di kecamatan Ngaras terdapat masyarakat yang lolos dalam seleksi program prakerja meskipun tidak memenuhi persyaratan yang sudah disediakan. Seperti data yang diperoleh berdasarkan hasil wawancara di lapangan berikut:

“usia saya baru saja 17 tahun, jika sesuai dengan peraturan yang berlaku saya tidak bisa mengikuti program prakerja tersebut, tetapi fakta di lapangan saya lolos pendaftaran program prakerja dan akhirnya saya dapat mengikuti pelatihan sampai mendapatkan intensif.”⁵²

Dari data diatas seharusnya Subekti tidak dapat menerima Kartu Prakerja karena umurnya yang baru 17 tahun, hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden (PERPRES) Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Pra Kerja. Disini dijelaskan bahwa batas usia penerima Kartu Prakerja dari 18 sampai 64 tahun. Dan juga dari data yang diperoleh dari hasil wawancara bersama Ali Husein bahwa masyarakat yang lolos pelatihan prakerja dan yang belum lolos tidak diberikan keterangan lebih rinci, sehingga kurang adanya keterbukaan.

Data lain yang ditemukan mengenai ketidaksesuaian antara SOP dan penerima program prakerja dibuktikan dari hasil wawancara bersama Bapak Selamat Raharjo sebagai salah satu masyarakat yang menerima program kartu prakerja mengemukakan:⁵³

“Umur 65 Tahun, ternyata ketika coba ikut mendaftar prakerja, walaupun beberapa kali sempat gagal tapi

⁵² Subekti, “Masyarakat Penerima Program Prakerja, Wawancara Jumat 10 Maret 2023. Pukul 09.30-10.00.

⁵³ Selamat Raharjo, “Masyarakat Penerima Program Prakerja, Wawancara Jumat, 10 Maret 2023. Pukul 16.00

akhirnya saya bisa lolos sampai ikut pelatihan dan dapat intensif.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas progam Kartu Prakerja tidak sesuai peruntukannya, batasan umur sesuai PERPRES No. 76 Tahun 2020 bahwa penerima Kartu Prakerja yakni 18 – 64 tahun, sedangkan usia informan sudah 65 tahun. Kemudian kartu Prakerja tersebut seharusnya sasarannya untuk orang yang belum memiliki pekerjaan atau menganggur tetapi untuk informan tersebut sudah memiliki bengkel motor. Artinya kebijakan tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data yang diperoleh, secara umum masyarakat di Kecamatan Ngaras yang mendaftar program kartu prakerja sudah memenuhi syarat untuk menjadi peserta program tersebut, hanya saja terdapat beberapa masyarakat yang tidak sesuai persyaratan bisa lolos sampai mengikuti pelatihan. Impelementasi yang terjadi pada program prakerja untuk persyaratan atau SOP yang berlaku tidak sepenuhnya berjalan dengan baik di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa masyarakat yang lolos walaupun tidak sesuai dengan persyaratan yang berlaku.

b. Prosedur Pendaftaran

Untuk menjadi salah satu peserta dari program kartu prakerja maka peserta diwajibkan untuk melalui beberapa prosedur yang telah ditetapkan sebelumnya, semua peserta diwajibkan untuk melalui proses tersebut sampai ada pengumuman langsung yang diumumkan melalui akun masing- masing. Langkah-langkah yang harus dilalui yaitu: Masyarakat dapat mengakses program kartu prakerja melalui website <https://www.prakerja.go.id/>.

Sebelum mendaftar Kartu Pra Kerja, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Untuk mendaftar akun Kartu Pra Kerja itu tidaklah sulit. Kita dapat menggunakan email atau nomor ponsel kamu yang aktif. Pendaftar juga wajib

mengisi data atau informasi pada website dengan benar. Selain itu, kita juga harus menggunakan nama dan data diri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang sah. Untuk membuat akun kartu pra kerja sebagai berikut:

1. Buka <https://www.prakerja.go.id/>
2. Masukkan nama lengkap, email dan kata sandi
3. Klik Daftar.
4. Selanjutnya verifikasi email kamu
5. Lakukan verifikasi yang telah dikirimkan via email.
6. Pendaftaran berhasil. Kamu berhasil membuat akun Kartu Prakerja⁵⁴

Pendaftaran Kartu Prakerja

1. Lakukan login menggunakan akun yang telah dibuat di langkah sebelumnya
2. Setelah berhasil daftar akun dan login akun, masuk ke Dashboard
3. Isi verifikasi KTP
4. Klik Berikutnya
5. Lengkapi data diri dan unggah foto KTP dan swafoto dengan KTP kamu
6. Lakukan Verifikasi Telepon
7. Klik kirim
8. Setelah selesai verifikasi KTP, mengisi data diri, dan verifikasi nomor telepon, isi deklarasi survey
9. Berikutnya kamu wajib melakukan tes 10. Setelah selesai tes, ikut seleksi batch
11. Pilih batch yang diinginkan dan sesuaikan dengan domisili
12. Pendaftaran selesai
13. Tunggu proses evaluasi pendaftaran⁵⁵

⁵⁴ Hukum and Binbangkum, "Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 Segera Dibuka, Ini Syaratnya."

⁵⁵ Hukum and Binbangkum.

Masyarakat Kecamatan Ngaras terkhusus bagi yang mendaftar program kartu prakerja sudah melakukan langkah-langkah di atas sehingga banyak diantara mereka yang memang berhasil lolos sebagai penerima insentif dari program tersebut. Walaupun masih ada pula beberapa warga yang sudah mendaftar namun tidak atau belum lulus pada tahap seleksi program kartu prakerja tersebut.

Berdasarkan prosedur pendaftaran yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, masyarakat awalnya mengalami kesulitan untuk mengikuti prosedur yang ada. Hal ini disebabkan, masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Padahal, ketika masyarakat mendapatkan ajaran mengenai cara mendaftar kartu prakerja, mereka menganggap itu hal yang mudah. Seperti data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan Ibu siska warga desa Suka Maju kecamatan Ngaras sebagai berikut.⁵⁶

“ketika awal pendaftaran, saya merasa kesulitan, tetapi ketika saya diajarkan oleh saudara ternyata pendaftaran kartu prakerja cukup mudah. Saya merasa kesulitan karena kurangnya pemahan saya di bidang IT.”

Berdasarkan data diatas, masyarakat yang mendaftar secara online program prakerja mengalami kesulitan ketika mereka tidak mendapat arahan atau sosialisasi secara langsung, ketika masyarakat mendapatkan arahan atau sosialisasi mengenai langkah-langkah pendaftaran sampai mengikuti pelatihan secara langsung maka masyarakat mudah dalam pelaksanaanya.

1. Implementasi kebijakan Kartu Prakerja dalam Peningkatan Kompetensi di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir berdasarkan Teori Edward III

Kartu Prakerja merupakan program pemerintah mengenai pengembangan kompetensi berupa bantuan biaya yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja yang mengalami PHK, atau pekerja

⁵⁶ Siska Hasanah. “Masyarakat Penerima Program Prakerja, Wawancara, 17 Maret 2023. Pukul 13.00

yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Program ini merupakan kolaborasi pemerintah dengan pihak swasta yang didesain sedemikian rupa untuk memberikan nilai kepada pengguna dan juga memberikan nilai kepada sektor swasta. Program Kartu Prakerja tersebut diresmikan melalui Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Pra-Kerja.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori Edward III bahwa implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh 4 komponen, yakni: (1) Komunikasi; (2) Sumber Daya; (3) Disposisi; dan (4) Struktur Birokrasi.

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya.

Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti

apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua pelaksana dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan dan jika dipaksakan maka tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor komunikasi yang terjadi pada implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti juga akan menjabarkannya ke dalam 3 (tiga) indikator yang terdapat pada faktor komunikasi. Pembahasan mengenai faktor komunikasi tersebut adalah sebagai berikut :

1) Transmisi

Proses penyampaian Informasi mengenai program kartu prakerja oleh Pemerintah kepada kepada masyarakat, hal tersebut dilakukan agar kebijakan program prakerja dapat tertransformasikan secara tepat di setiap kalangan masyarakat. Penyampain informasi tersebut tidak dilakukan secara langsung, tetapi diinfromasikan melalui media sosial seperti instagram dan juga website prakerja itu sendiri. Adapun hal-hal yang diinfromasikan mengenai persyaratan dan juga hal-hal penting

lainnya mengenai aturan apa saja yang harus di ikuti oleh pendaftar program prakerja.

Dari pemaparan data dengan informan yang menyatakan bahwa transmisi dilakukan secara online atau melalui sosial media. Maka transmisi yang terjadi sesuai dengan ungkapan George C. Edward III, yang menyatakan bahwa kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan, baik langsung maupun tidak langsung terhadap kebijakan serta dengan penyampaian yang baik. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator transmisi pada implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat berjalan baik, karena informasi yang disampaikan oleh pemerintah sudah tepat sasaran. Indikasi dari hal tersebut adalah masyarakat Indonesia.

2) Kejelasan

Dapat dilihat bahwa kejelasan Implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat cukup baik, hal ini karena para sasaran kebijakan sudah mengetahui adanya kebijakan pada program prakerja. Hal tersebut terjadi karena implementor sudah banyak yang mendaftar dan juga lolos pada program pekerja. Namun, penyampaian secara tidak langsung dinilai kurang efektif bagi para implementor. Berdasarkan data yang diperoleh dari informan, bahwa terdapat beberapa peserta program prakerja yang tidak sesuai dengan persyaratan dapat mendaftar dan lolos sehingga dapat mengikuti

pelatihan. Sedangkan, bagi peserta yang tidak lolos tidak ada kejelasan atau alasan mengapa tidak lolos.

Hal ini belum sesuai dengan argument George C. Edward III bahwa jika kebijakan-kebijakan dapat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaannya tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas sampai kesasaran kebijakan. Peneliti menyimpulkan bahwa pada indikator kejelasan pada implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dari metode sosialisasi yang dilakukan secara tidak langsung sehingga penyampaian informasi belum benar-benar tersampaikan ke semua masyarakat dengan jelas. Sehingga walaupun masyarakat sudah tahu tentang persyaratan program prakerja, namun masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami karena ketidaksesuaian antara syarat dan fakta yang terjadi di lapangan bagi pendaftar program prakerja.

3) Konsisten

Berdasarkan data terkait konsistensi komunikasi dalam implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, peneliti mengamati dapat dikatakan belum baik karena banyaknya masyarakat yang masih kurang jelas. Hal ini terjadi ketika terdapat beberapa masyarakat di kecamatan Ngaras yang tidak sesuai persyaratan dapat mendaftar program kerja dan lolos. Sedangkan, bagi pendaftar yang sudah sesuai kriteria tidak lolos dan tidak diberi alasan mengapa tidak lolos. Kondisi yang terjadi belum sesuai dengan ungkapan George C. Edward III

yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan yang efektif, maka perintah-perintah harus konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan).

“Pada dasarnya berhasil atau tidaknya tujuan dari rencana itu dari komunikasi antara pembuat aturan dan yang menjalankan aturan. Kalo komunikasi pada pendaftaran program kartu prakerja ini yah kami tidak melakukan komunikasi secara langsung dengan pemerintah. Kami hanya mendapatkan informasi dari sosial media dan juga saudara atau tetangga di sini. Kalo untuk persyaratan-persyaratannya ya kami dapatkan di internet. Tapi itu kadang kami gak jelasnya, karena ada peserta yang tidak sesuai tapi masih lolos dan yang gak lolos juga tidak ada pemberitahuan alasan tidak lolosnya. Jadi agak bingung aja kami.”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa terciptanya komunikasi yang baik antara pembuat kebijakan dan yang menjalankan kebijakan akan mewujudkan implementasi yang baik. Dalam pelaksanaannya, program kartu prakerja sudah mengkomunikasikan mengenai persyaratan melalui berbagai lini masa. Namun, karena masih terdapat beberapa miskomunikasi bagi pendaftar yang lolos dengan tidak sesuainya persyaratan dan kurang meluasnya sosialisasi secara merata kepada masyarakat. Jadi, masih ada masyarakat yang kurang memahami bagaimana cara untuk mengikuti program kartu prakerja.

b. Sumberdaya

Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor Sumber daya yang terdapat dalam implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat, peneliti juga

akan menjabarkan kedalam 2 (dua) indikator yang terdapat dalam faktor sumber daya. Dua indikator tersebut antara lain :

1) Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya manusia sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi, sebab tanpa sumber daya manusia yang handal implementasi kebijakan akan berjalan lambat. Oleh karena itu, implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat membutuhkan sumber daya yang cukup dan mampu untuk menguasai dibidangnya dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Sumber daya manusia (penerima program prakerja) yang dimaksud dalam pelaksanaan program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja adalah seluruh masyarakat yang menerima dan lolos untuk mengikuti pelatihan prakerja yang merupakan sebagai pelaksana kebijakan. Adapun data yang diperoleh oleh penulis mengenai penerima kartu prakerja yang sudah mengikuti pelatihan dan sudah sesuai peruntukannya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Jumlah Penerima Program Prakerja 2020-2021

No	Desa	Jumlah Pendaftar	Jumlah Penerima
1	Pardasuka	39	19
2	Negeri Ratu Ngaras	21	18
3	Bandar Jaya	29	15
4	Kota Batu	31	16
5	Mulang Maya	29	15
6	Raja Basa	33	16
7	Padang Dalam	36	19
8	Suka Maju	29	16
9	Sukarame	20	16
Jumlah		267	150

Sumber: data kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat

Berdasarkan data pendaftar dan peserta yang lolos prakerja di kecamatan Ngaras, terdapat 267 peserta dari 9 desa yang mendaftar terdiri dari 150 peserta yang lolos.

Tabel 4.2 Penerima Kartu Prakerja yang Sudah Mengikuti Pelatihan dan sudah sesuai Peruntukannya⁵⁷

NO	NAMA DESA	Sudah Mengikuti Pelatihan	Jumlah Peningkatan kompetensi yang Di Ikuti	Keterangan
1	Pardasuka	3 orang	Bengkel motor(1x)	1 sudah terampil dan bekerja, 2 belum trampil & belum bekerja

⁵⁷ Andi Indrawara “Camat di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat” , Wawancara, 17 Maret 2023. Pukul 09.00 WIB.

NO	NAMA DESA	Sudah Mengikuti Pelatihan	Jumlah Peningkatan kompetensi yang Di Ikuti	Keterangan
2	Sukarame	2 orang	Bengkel motor(1x)	1 sudah trampil & bekerja, 1 belum trampil & belum bekerja
3	Sukamaju	2 orang	Pabrik (1x)	Sudah trampil & bekerja
4	Rajabasa	3 orang	Pabrik (1x)	Sudah trampil & bekerja
5	Mulang Maya	2 orang	Pabrik (1x)	Sudah trampil & bekerja
6	Padang Dalam	2 orang	Pabrik (1x)	Sudah trampil & bekerja
7	Bandar Jaya	2 orang	Pabrik (1x)	Sudah trampil & bekerja
8	Kota Batu	2 orang	Pabrik (1x)	Sudah trampil & bekerja
9	Nagri Ratu Ngaras	2 orang	Pabrik (1x)	Sudah trampil & bekerja
	TOTAL	20 orang	Sudah sesuai usia & Peruntutannya	-17 orang yang trampil & sudah bekerja -3 orang yang belum trampil & belum bekerja.

Sumber: data kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat

Dari data tersebut diatas terlihat jelas terdapat 20 orang jumlah penerima kartu prakerja yang sudah mendapatkan pelatihan sebanyak 1 kali dengan jenis pelatihan bengkel motor dan pabrik serta terdapat 17 orang yang sudah trampil dan sudah mendapatkan pekerjaan dan terdapat 3 orang yang belum trampil dan belum mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan keterangan dari camat kecamatan Ngaras⁵⁸ yakni bahwa ada 10 penerima kartu prakerja yang sudah mengikuti pelatihan namun tidak sesuai peruntukannya, adapun data-datanya adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3 Data Penerima Program yang Tidak Sesuai Peruntukannya

NO	NAMA DESA	Jumlah Penerima Program yang tidak sesuai Peruntukannya	Jenis & Banyaknya Pelatihan yang Di Ikuti	Keterangan
1	Pardasuka	1 orang	Bengkel motor (1x)	Usia dibawah 18 tahun, belum trampil & belum bekerja
2	Sukarame	2 orang	Bengkel motor (1x)	Usia diatas 64 tahun, terampil dan sudah bekerja
3	Sukamaju	1 orang	Pabrik	Tidak mempunyai KTP
4	Rajabasa	1 orang	Pabrik	Sudah mempunyai pekerjaan

⁵⁸ Sumber : Andi Indrawara, Camat di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat.

5	Mulang Maya	1 orang	Pabrik	Usia diatas 64 tahun, trampil
6	Padang Dalam	1 orang	Pabrik	Usia dibawah 18 tahun
7	Bandar Jaya	1 orang	Pabrik	SDA
8	Kota Batu	1 orang	Pabrik	SDA
9	Negri Ratu Ngaras	1 orang	Pabrik	Sudah mempunyai pekerjaan
	TOTAL	10 Orang		Tidak sesuai peruntukan Nya

Sumber: data kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat

Dari data tabel diatas menunjukkan bahwa, terdapat 10 orang yang menerima program prakerja namun tidak sesuai peruntukkannya. Hal ini disebabkan tidak sesuainya peraturan yang tersedia, dan peserta bisa lolos sampai dengan mengikuti pelatihan. Namun, dalam pelaksanaannya peserta mengikuti pelatihan dengan baik sampai selesai sesuai keterampilan yang dibutuhkan dan diinginkan.

Sumber daya manusia (SDM) atau dalam hal ini ditujukan pada peserta yang mendaftar dan mengikuti pelatihan di program prakerja sangat antusias. Setelah mengikuti pelatihan yang disediakan dan dipilih sesuai minat dan kebutuhan, maka peserta merasa menambahnya kemampuan dan pengetahuan. Beberapa peserta yang sudah mengikuti pelatihan membuka bisnisnya sendiri. Seperti data yang diperoleh dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Setelah berhasil terdaftar saya menunggu dan beberapa minggu kedepan saya mendapat pelatihan bengkel motor selama 2 bulan dan alhamdulillah saya banyak mendapatkan ilmu dari pelatihan tersebut dan saya memberanikan diri untuk buka bengkel motor

sendiri dan sampai sekarang saya sudah bisa menopang untuk perekonomian rumah tangga saya.”⁵⁹

“di kecamatan Ngaras ini sudah beberapa yang lolos dan ikutan program prakerja ini, dari hasilnya itu kan masyarakat bisa dapet intensif selama 4 bulan berturut-turut. Itu masyarakat banyak yang menggunakannya untuk modal usaha sama persiapan daftar-daftar kerja. Ada juga yang dipakai untuk ikut pelatihan secara offline. Intinya perekonomian dimasa pandemic ini lebih meningkat jika masyarakat meerima program prakerja ini”⁶⁰

Data diatas menggambarkan bahwa masyarakat yang mengikuti program prakerja ini senang karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, salah satunya yakni masyarakat dapat membuka usaha yang dibekali dari pelatihan-pelatihan dari beberapa platform pilihan dan dibantu modal dengan adanya intensif. Dari data yang didapatkan, terdapat kelebihan dari adanya program prakerja yang diberikan kepada masyarakat. Dengan adanya program tersebut dapat meningkatkan SDM yang ada di kecamatan Ngaras.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sumber daya merupakan faktor penting demi terselenggaranya kebijakan dengan baik dimana dalam pelaksanaannya juga harus memiliki kesiapan yang memadai dan matang, mulai dari kesiapan dari segi kualifikasi, kompetensi serta juga siap dalam hal pemahaman dan paradigma (pola pikir) terhadap kebijakan tersebut. Walaupun dalam implementasinya yang ada di kecamatan Ngaras, masih terdapat sumber daya manusia yang

⁵⁹ Suyatman “Pemuda Pekon Parda Suka Kecamatan Ngaras” hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 10.00-11.00 Wib

⁶⁰ Budi Irawan “Ketua Karang Taruna” hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 09.00-10.00 Wib

lolos dengan tidak sesuai peruntukannya atau yang tidak sesuai dengan persyaratan yang sudah dicanangkan.

2) Sumber Daya Non Manusia

Perintah-perintah implementasi cenderung tidak efektif apabila dalam implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat kekurangan sumber daya pendukung, salah satu sumber penting adalah fasilitas atau sarana prasarana seperti penjelasan alur bagan menggunakan spanduk atau SOP itu sendiri di jelaskan di Website. Sarana prasarana menjadi salah satu hal penting dalam menjalankan program prakerja. Oleh karena itu, saran prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan mensosialisasikan program prakerja kepada masyarakat sudah terpenuhi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan disediakannya banya platform dengan beragam pelatihan bagi peserta prakerja.

Berdasarkan penjelasan di atas, sarana prasarana pelayanan merupakan salah satu hal penting dalam menjalankan program prakerja. Oleh karena itu sarana prasarana harus secara tepat disiapkan pada saat akan dipergunakan. Dalam hal ini pelaksanaan program kartu prakerja dapat dikatakan berjalan sesuai dengan harapan, karena sarana prasarana yang dibutuhkan bagi peserta prakerja semua terpenuhi. Sehingga hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Edward III yang menyatakan bahwa sumber daya non manusia berupa sarana prasarana merupakan hal yang penting dalam implementasi.

c. Disposisi

Disposisi Salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah sikap implementor.

Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Berdasarkan data hasil penelitian dapat diamati dari pernyataan informan yang menyatakan bahwa sikap pelaksanaan dalam implementasi program kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat cukup baik. Seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis sebagai berikut:

“Di Kecamatan Ngaras terdapat 150 orang dari total keseluruhan 9 Pekon yang lolos program kartu prakerja”⁶¹

Data diatas menunjukkan terdapat kepuasan bagi peserta yang sudah lolos program prakerja dan sudah mengikuti pelatihannya. Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Demikian pula apabila tingkah laku atau perspektif-perspektif para pelaksana berbeda dengan para pembuat keputusan, maka proses pelaksanaan suatu kebijakan menjadi semakin sulit.

Namun ketika suatu kebijakan diterapkan maka harus adanya perencanaan yang matang dari pembuat kebijakan dan harus serius menyikapi permasalahan yang menjadi hambatan pelaksanaan program prakerja. Karena Implikasi yang akan terjadi dalam implementas program

⁶¹ Suyatman “Pemuda Pekon Parda Suka Kecamatan Ngaras” hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 pukul 10.00-11.00 Wib

kartu prakerja dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat kedepannya jika hal tersebut dibiarkan, akan menjadi sebuah tradisi aparat pelaksana yang tidak baik dan menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Pelaksanaan suatu kebijakan akan dapat berjalan dengan baik apabila adanya standar operasi prosedur sebagai pedoman pelaksanaan program prakerja, telah diatur dalam prosedur-prosedur dasar kerja atau Standar Operational Prosedur (SOP).

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan program prakerja, telah diatur prosedur-prosedur dasar pelaksanaan, prosedur-prosedur dasar kerja atau standar operating prosedur (SOP) sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Prosedur-prosedur dasar kerja adalah prosedur-prosedur atau standar yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dengan adanya prosedur dasar kerja maka implementasi kebijakan dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang mengatakan bahwa dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dan menyeragamkan tindakan-tindakan dari pejabat di dalam organisasi.

Secara garis besar, harapan yang diinginkan adalah terwujudnyamasyarakat yang sejahtera di era pandemic covid-19. Berdasarkan pemaparan informan, hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan prosedur operasi standar yang berupa juknis pelaksanaan kebijakan sudah begitu paham dan mengerti standart operasional prosedur (SOP). Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa

SOP dalam Peraturan program prakerjan ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat persyaratan dan aturan bagi pendaftar prakerja. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan program prakerja struktur birokrasi sudah tersedia pada pemerintahan pusat. Ketersediaan kelembagaan ini menjadikan setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan program prakerja. Karena dengan adanya kejelasan mengenai praturan dan persyaratan maka masyarakat akan lebih mudah dalam ikut andil pada program prakerja yang sudah disediakan oleh pemerintah.

B. Kelanjutan Program Kartu Prakerja dalam Peningkatan Kompetensi Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan

Dalam perjalanannya, seiring dengan melandainya kasus pandemi Covid-19, Pemerintah atau dinas ketenagakerjaan akan melakukan penyesuaian skema semi bansos pada Program Kartu Prakerja menjadi skema normal pada tahun 2023. Dalam hal ini, Program Kartu Prakerja nantinya lebih difokuskan sebagai bantuan peningkatan skill dan produktivitas angkatan kerja, berupa bantuan biaya pelatihan secara langsung kepada peserta dan insentif pasca pelatihan dengan ragam pelatihan *skilling*, *reskilling*, dan *upskilling*.



Tabel 4.4 Data Jumlah Peserta Prakerja Dalam Peningkatan Kompetensi Kerja oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Barat 2022-2023⁶²

No	Desa	Jumlah	Terlaksana Dalam Peningkatan Kompetensi Kerja
1	Pardasuka	23	10
2	Negeri Ratu Ngaras	19	18
3	Bandar Jaya	25	19
4	Kota Batu	34	28
5	Mulang Maya	20	16
6	Raja Basa	25	21
7	Padang Dalam	27	26
8	Suka Maju	21	17
9	Sukarame	16	13
Jumlah		210	168

Sumber: Data dinas ketenagakerjaan Kabupaten Pesisir Barat 2022-2023



Dalam meningkatkan kompetensi kerja bagi peserta prakerja di kecamatan Ngaras, maka pemerintah setempat melakukan kerja sama bersama dinas ketenagakerjaan. Hal ini bertujuan agar mempermudah masyarakat yang akan melakukan pelatihan secara offline. Dalam hal ini, terdapat 168 jumlah peserta yang terlaksana dalam peningkatan kompetensi kerja di kecamatan Ngaras dari jumlah peserta seluruhnya yaitu 210 orang. Adapun program prakerja lanjutan seperti ini berlaku bagi seluruh masyarakat Indoensia termasuk masyarakat kecamatan Ngaras kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak camat Ngaras:⁶³

⁶² Kardiato “Pegawai Dinas Ketenagakerjaan”, *Wawancara, 27 desember 2023. Pukul 09.00 WIB.*

⁶³ Andi Indrawara “Camat di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat”, *Wawancara, 17 Maret 2023. Pukul 09.00 WIB.*

“berdasarkan siaran pers kementerian koordinator bidang perekonomian menjelaskan bahwa program prakerja ini tetap berlanjut, hanya saja skema yang digunakan itu kembali ke normal. Skema ini seperti semi bansos, jadi masyarakat tetap bisa mengikuti program ini. Selain itu, ada perubahan juga untuk besaran bantuan yang akan diberikan. Nantinya, untuk masyarakat yang sudah lolos mendaftar program prakerja akan mendapat 4,2 juta. 3,5 juta untuk biaya pelatihan, 600 ribu insentif setelah pelatihan, dan 100 ribu insentif survey. Seperti itu kelanjutan program prakerja sekarang.”

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut, bahwa pemerintah tetap melanjutkan program kartu prakerja sebagai tujuan agar masyarakat tetap dapat meningkatkan kompetensi kerja dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Dalam tindak lanjutnya, setelah pandemic mulai melandai. Pemerintah meningkatkan biaya pelatihan bagi masyarakat menjadi sebesar 3,5 juta yang sebelumnya hanya sebesar 1 juta.

Pelatihan prakerja dalam skema yang baru dapat berlangsung secara hybrid, yakni dapat berjalan secara online ataupun offline. Hal ini disebabkan, karena pandemi covid-19 yang sudah berakhir. Dalam hal ini, pemerintah pusat menghimbau pemerintah daerah atau dinas ketenagakerjaan untuk bisa turut menyelesaikan pelaksanaan skema normal program prakerja daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini juga dapat mendorong lembaga pelatihan potensial yang ada di daerah masing-masing, baik itu BLK dan atau lembaga pelatihan swasta untuk dapat menjadi penyedia pelatihan, khususnya pelatihan luring, bagi penerima Kartu Prakerja di setiap daerah.

“Iya, selain itu juga untuk pelatihannya. Masyarakat juga bisa mengikuti pelatihan dengan sistem luring. Sehingga, masyarakat lebih mudah untuk mengikuti pelatihan sesuai

skill yang dimiliki. Kecamatan Ngaras juga melakukan kerja sama dengan beberapa BLK, seperti pelatihan menjahit, memasak, teknik sepeda motor, computer dan bahasa asing. Jadi masyarakat yang ada dikecamatan Ngaras ini akan lebih mudah untuk mengikuti pelatihan secara langsung dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Karena, pelatihan sebelum-sebelumnya masyarakat hanya bisa melihat melalui handphone.”⁶⁴

Berdasarkan data yang diperoleh, masyarakat yang ada di kecamatan Ngaras ditahun 2023 dapat mengikuti program pelatihan kartu prakerja secara luring, dalam hal ini pemerintah yang ada di kecamatan Ngaras bekerjasama dengan beberapa BLK yang ada didaerah setempat. Program kerjasama ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengikuti pelatihan secara langsung dan tidak jauh dari tempat tinggal masyarakat.

Dalam pelaksanaan kelanjutan program prakerja yang ada dikecamatan Ngaras, pemerintah setempat mengadakan kerjasama dengan BLK setempat guna mempermudah masyarakat mengikuti pelatihan.

Pandemi covid-19 yang masuk ke Indonesia pada awal tahun 2020 membuat masyarakat mengalami banyak perubahan, sehingga masyarakat harus mulai beradaptasi dengan segala bentuk aktivitas yang ada. Salah satu yang harus di sesuaikan pada saat pandemic yaitu pekerjaan masyarakat. Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena PHK, sedangkan kebutuhan di saat pandemic meningkat. Dari hal tersebut, pemerintah mengadakan program kartu kerja yang dimulai sejak tanggal 11 April 2020.

Berdasarkan data yang di peroleh dari kecamatan Ngaras, sejak tahun 2020 awal sampai 2020 akhir, pembukaan program

⁶⁴ Andi Indrawara “Camat di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat” , *Wawancara, 17 Maret 2023. Pukul 09.00 WIB.*

kartu prakerja sebanyak 11 gelombang. Di kecamatan Ngaras, mulai terdata untuk masyarakat yang lolos program prakerja yaitu di gelombang ke-2. Pada gelombang ke 2, hanya ada 2 pendaftar yang lolos program kartu prakerja.⁶⁵

Prosedur pendaftaran prakerja sampai akhirnya peserta mendapatkan insentif melalui beberapa tahapan. Pertama, peserta mendaftarkan diri di program prakerja, kemudian peserta menunggu hasil pengumuman melalui website, selanjutnya jika peserta lolos pada gelombang tersebut maka peserta akan diarahkan mengisi data untuk kepentingan penerimaan insentif pembelian pelatihan, setelah itu peserta prakerja membeli pelatihan prakerja, tahapan selanjutnya peserta mengikuti pelatihan prakerja sampai tuntas dan mendapatkan sertifikat dari lembaga pelatihan, setelah mendapatkan sertifikat tersebut maka peserta akan mendapatkan insentif. Peserta juga diminta untuk mengisi survei pada program prakerja, yang nantinya peserta akan memperoleh tambahan insentif.⁶⁶

Survei yang dilakukan oleh peserta program prakerja ini sebagai evaluasi yang ditanggapi oleh masyarakat atau peserta saat mengikuti program prakerja dari awal pendaftaran sampai peserta memperoleh insentif yang masing-masing dikirimkan ke rekening peserta. Dalam hal ini, pemerintah memberikan insentif atau bantuan tambahan setelah peserta melakukan survey program prakerja. Adapun evaluasi yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah yaitu mengenai banyaknya joki kartu prakerja yang ditemukan di tengah masyarakat. Hal ini tentunya terdapat pengawasan yang tidak maksimal terhadap peserta, dibawah naungan Menko Perekonomian yang secara pengawasan tidak

⁶⁵ Andi Indrawara “Camat di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat” , *Wawancara*, 17 Maret 2023. Pukul 09.00 WIB.

⁶⁶ Azmi Aulia Solihin, Asep D Jatnika, and Desi Yunita, “Efektivitas Bantuan Sosial Program Prakerja Dalam Membantu Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)* 2 (2022): 239–49.

spesifik. Hal ini akan berdampak tidak tepatnya sasaran yang melibatkan dana yang besar pada peserta program prakerja.

Dalam hal ini, pemerintah daerah yang berasal dari desa, kecamatan ataupun kabupaten tidak bisa menindaklanjuti peserta yang sudah lolos program prakerja. Karena setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta dapat mengaplikasikan ilmu atau *skill* yang diperoleh pada bidangnya masing-masing.

Implementasi kebijakan yang terjadi pada program kartu prakerja di kecamatan Ngaras ini sendiri merupakan suatu aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkannya arahan atau aturan yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya dalam pengelolaan *input* yang nantinya akan menghasilkan *output* atau *outcome* bagi peserta itu sendiri. Dalam pelaksanaan program prakerja, tentu harapannya akan menghasilkan *outcome* yang terbaik, yaitu masyarakat dapat menciptakan pekerjaan dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Adapun turunan dari implementasi itu sendiri yaitu, adanya arahan dan aturan, kemudian terjadilah pelaksanaan yang di sebut dengan implelementasi.





BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kesimpulan berdasarkan Teori Edward III:
 - a. Komunikasi, program kartu prakerja sudah mengkomunikasikan mengenai persyaratan melalui berbagai lini masa. Namun, karena masih terdapat beberapa miskomunikasi bagi pendaftar yang lolos dengan tidak sesuainya persyaratan dan kurang meluas nya sosialisasi secara merata kepada masyarakat. Jadi, masih ada msyarakat yang kurang memahami bagaimana cara untuk mengikuti program kartu prakerja.
 - b. Sumberdaya, masyarakat yang mengikuti program prakerja ini senang karena memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, salah satunya yakni masyarakat dapat membuka usaha yang dibekali dari pelatihan-pelatihan dari beberapa platform pilihan dan dibantu modal dengan adanya intensif.
 - c. Disposisi, terdapat kepuasan bagi peserta yang sudah lolos program prakerja dan sudah mengikuti pelatihannya. Berdasarkan hal diatas, peneliti menyimpulkan jika para implementor bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu, dalam hal ini berarti adanya dukungan, kemungkinan besar mereka melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.
 - d. Struktur Birokrasi, SOP dalam Peraturan pogram prakerjan ini sudah cukup baik dilihat dari aspek SOP yang telah memuat persyaratan dan aturan bagi pendaftar prakerja. Artinya dengan sudah lengkapnya SOP tentang pelaksanaan program prakerja struktur birokrasi sudah tersedia pada pemerintahan pusat. Ketersediaan kelembagaan ini menjadikan setiap lembaga yang ditunjuk memiliki tugas dan wewenang masing-masing dalam melaksanakan program prakerja.

2. Kelanjutan program kartu prakerja yang dilaksanakan oleh dinas ketenagakerjaan bertujuan untuk mengevaluasi dan mengupdate sistem yang sudah ada sebelumnya. Pelatihan prakerja dalam skema yang baru dapat berlangsung secara hybrid, yakni dapat berjalan secara online ataupun offline. Hal ini disebabkan, karena pandemi covid-19 yang sudah berakhir. Pemerintah pusat menghimbau pemerintah daerah atau dinas ketenagakerjaan untuk bisa turut menyukseskan pelaksanaan skema normal program prakerja daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini juga dapat mendorong lembaga pelatihan potensial yang ada di daerah masing-masing, baik itu BLK dan atau lembaga pelatihan swasta untuk dapat menjadi penyedia pelatihan, khususnya pelatihan luring, bagi penerima Kartu Prakerja di setiap daerah.

B. Rekomendasi

1. Sebaiknya pemerintah yang dalam hal ini Dinas Ketenagakerjaan lebih maksimal lagi dalam pengawasan terhadap program Kartu Prakerja agar benar-benar tepat sasaran.
2. Sebaiknya dilakukan sosialisasi secara berkelanjutan terkait program Kartu Prakerja agar calon penerima Kartu Prakerja dapat lebih memahami bagaimana melaksanakan pendaftaran Kartu Prakerja secara online.
3. Disnaker Provinsi Lampung diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM terutama pemahaman program kartu prakerja agar masyarakat tidak ragu bertanya mengenai permasalahan terkait kartu prakerja ke Disnaker. Sehingga, seluruh pegawai Disnaker nantinya dapat membantu menjawab permasalahan yang ditanyakan oleh masyarakat tanpa harus mengandalkan orang-orang tertentu saja.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Hufaz, 2019, *al-Quran Hafalan Mudah*, Penerbit Cordoba. Bandung. Adisasmita Raharjo, 2016, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Azmi Aulia Solihin, Asep D Jatnika, and Desi Yunita, (2022) “Efektivitas Bantuan Sosial Program Prakerja Dalam Membantu Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung,” *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)* 2
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, 2013, *Metodelogi Penelitian*, Remaja Rosdakarya. Jakarta
- Edison, Emron, Titing Kartika, and Rida Intan Dwi Lestari. “Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Di Sentra Industri Kulit Sukaregang.” *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata* 4, no. 1 (2017): 51–60.
- Hadi Sutrisno, 1985, *Metodelogi Research*, YPFAK, Psikologi UGM. Yogyakarta.
- Haidar Nawawi, 1987, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Garma Press. Yogyakarta.
- Herry Chandra, 1998, *Pintar di Faktor-Faktor Strategi Positioning Dalam Pemasaran Realstat*, Graha Ilmu, Surabaya.
- Imam Suprayogo dan Tabroni, 2003, *Metodelogi Penelitian Sosial-Agama*, Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Jumroh, MS. “Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik,” 2021, 81–150.
- Koentjaraningrat, 1981, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia Pustaka. Jakarta.
- Kartini Kartono, 1996, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Mandar Maju. Bandung.

- Manulang, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rineka Cipta. Jakarta.
- Mulyaningsih Endang, 2011, *Metode Penelitian Terapan Bidang Pendidikan*, ALFABETA. Yogyakarta. Edison, Emron, Titing Kartika, and Rida Intan Dwi Lestari. "Pengaruh Kepuasan Kerja Dan Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan Di Sentra Industri Kulit Sukaregang." *Barista: Jurnal Kajian Bahasa Dan Pariwisata* 4, no. 1 (2017): 51–60.
- Hukum, Seksi Informasi, and Ditama Binbangkum. "Pendaftaran Kartu Prakerja 2023 Segera Dibuka, Ini Syaratnya," 2023, 5–7.
- Jumroh, MS. "Implementasi Pelayanan Publik Teori Dan Praktik," 2021, 81–150.
- Mustari, Nuryanti. "Pemahaman Kebijakan Publik(Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik)." *Kebijakan Publik Deliberatif* 1 (2015): 286.
- Nurani, Dwi. "Analisis Implementasi Program Bantuan Operasional (BOS) Di SDN Jakarta Selatan," 2009.
- Presiden Republik Indonesia. "Peraturan Presiden No. 76 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja," no. 039037 (2020): 39037–48. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/140611/perpres-no-76-tahun-2020>.
- Purwanto, Erwan Agus, and Dyah Ratih Sulis. "Implementasi Kebijakan Publik. Jogyakarta," no. September (2012): 20.
- Rofifah, Dianah. "Implementasi Media Pembelajaran Permainan Ular Tangga Iqro." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 2020, 12–26.
- Septiyadi, M. R., & Rahayu, E. "Program Kartu Prakerja Sebagai Program Pemberdayaan Di Bidang Ketenagakerjaan Di Tengah Pandemi." *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 2 (2022): 7.
- Solihin, Azmi Aulia, Asep D Jatnika, and Desi Yunita. "Efektivitas

Bantuan Sosial Program Prakerja Dalam Membantu Perekonomian Dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Cinunuk Kabupaten Bandung.” *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)* 2 (2022): 239–49.

Suryani, S., and K. Kusni. “Analisis Pelatihan Pengembangan Infrastruktur Jalan Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa Kalangan Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman.” *Jurnal Ilmiah Pendidikan Kewarganegaraan*, 7, no. 1 (2019): 16–26.

Peraturan Perundangan-Undangan dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja.

PERPRES RI No. 113 Tahun 2022 Tentang Perubahan kedua atas PERPRES No. 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Permenko Perekonomian RI No. 17 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

B. Makalah, Majalah, Jurnal, Artikel

Adetya Fernanda, evaluasi program kartu prakerja ditinjau dari aspek kemanfaatan dan Aksesibilitas di kota Surabaya

Dinda siti rachma, tinjauan terhadap pelaksanaan pengembangan kompetensi kerja melalui program kartu pra kerja di kecamatan medan denai kota medan

Fadilah, 2017, *Pengaruh Kompetensi, Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor Bank Kalsel Cabang Pembantu di Banjar Masin. Jurnal Bisnis dan Pembangunan*. Banjar Masin.

Ni Komang Ayu Indra Yanti dkk, *public administration journal vol 02 no. 02 “kajian pelaksanaan program kartu prakerja dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga” di kabupaten bandung*

Palmira PermataBBachtiar dkk, *Smeru Vol 01 No. 03. kartu prakerja di tengah pandemi covid-19: asesmen cepat dari sudut pandang peserta program.*

Siti Indayani & Budi Hartono, *Ekonomi & Manajemen Universitas Bina Sarana Informatika Vol. 18 No. 02 ANALISIS PENGANGGURAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI AKIBAT PANDEMI COVID-19.*

Toni Predianto & Khoirrosyidin, *mengkaji upaya pemerintah melalui program kartu prakerja dalam prespektif pemberdayaan di masa pandemi covid-19, Journal of Government and Political studies Vol. 3 No. 2*

Hasil Wawancara dengan Bapak Andi Indrawara, S. Sos Selaku Camat di Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat di Kantor Kecamatan Ngaras.

Hasil Wawancara dengan Bapak Drs. Berdi Syahputra Selaku Tokoh Adat dan masyarakat di Kecamatan Ngaras.

Hasil Wawancara dengan beberapa pemuda di Kecamatan Ngaras Selaku Penerima Kartu Prakerja.

